

**AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)  
SUMATERA SELATAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK  
COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATION OF THE  
TREADWAY COMMISSION (COSO)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
PUTRI FINISHITA  
NIM. 1730803060**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2022**

**AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)  
SUMATERA SELATAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK  
COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATION OF THE  
TREADWAY COMMISSION (COSO)**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Komputer Pada  
Bidang Sistem Informasi**

**OLEH:  
PUTRI FINISHITA  
NIM. 1730803060**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2022**

# HALAMAN PENGESAHAN

## AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI PADA BPKAD SUMATERA SELATAN MENGUNAKAN FRAMEWORK COSO

OLEH:

**Putri Finishita**

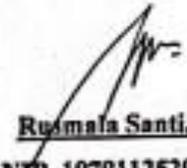
1730803060

**SKRIPSI**

Telah Disahkan Dan Disetujui Untuk Mengikuti Ujian Skripsi

**Dosen Pembimbing I**

**Dosen Pembimbing II**

  
Ruamala Santi, M.Kom  
NIP. 197911252014032002

  
Muhamad Son Muaric, M.Kom  
NIDN. 2029128503

Mengetahui  
Ketua Program Studi Sistem  
Informasi  
Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Raden Fatah Palembang

  
Dr. Fenny Purwani, M.Kom  
NIP. 196711071998032001

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Putri Finishita  
Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 22-juni-1998  
Program Studi : Sistem Informasi  
NIM : 1730803060

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa;

1. Seluruh data, informasi, intepretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam Skripsi ini kecuali yang disebutkan sumbernya ditulis dalam daftar pustaka adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli, bukan jiplakan dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Raden Fatah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
3. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggung jawabkan.

Palembang, 08 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Putri Finishita  
1730803060

# **INFORMATION TECHNOLOGY AUDIT AT BPKAD SOUTH SUMATERA USING COSO FRAMEWORK**

## **ABSTRACT**

*In minimizing Information Technology (IT) risks, an efficient and effective management of IT resources is required. To optimize its work so that it is more effective and efficient BPKAD South Sumatra needs to evaluate its audit. The purpose of this study is to evaluate how far the performance of existing information technology devices within the organization can provide benefits to the organization or company. As for carrying out the above objectives, a framework is needed in its auditing. COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO) is a framework used in auditing information technology, in its implementation we use several processes namely Risk Assessment Control Activities Monitoring Activities Monitoring Environment Control environment Information and Communication Monitoring. Where this shows that whether these processes the agency has implemented properly, although it still has to be maintained and continuously improved. This audit research resulted in the finding that the existing information system at BPKAD South Sumatra was not in accordance with the standards of the COSO framework.*

***Keywords: Audit, Coso, information Technology***

# **AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI PADA BPKAD SUMATERA SELATAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COSO**

## **ABSTRAK**

Dalam meminimalkan risiko Teknologi Informasi (TI) dibutuhkan manajemen pengelolaan sumber daya TI yang efisien dan efektif. Untuk mengoptimalkan pekerjaannya supaya lebih efektif dan efisien BPKAD Sumatera Selatan perlu mengevaluasi auditnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi seberapa jauh kinerja perangkat teknologi informasi yang ada di dalam organisasi sehingga dapat memberikan manfaat pada organisasi atau perusahaan. Adapun untuk melaksanakan tujuan di atas diperlukan framework dalam pengauditannya. COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION (COSO) adalah framework yang di gunakan dalam pengauditan teknologi informasi, dalam pengimplementasiannya kami menggunakan beberapa proses yaitu Penilaian Risiko (*Risk Assessment*) Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*) Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activites*) Lingkungan Kontrol (*Control enviroenmentt*) Pemantauan (*Monitoring*) Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*). Dimana hal ini menunjukkan bahwa apakah pada proses-proses tersebut pihak Instansi telah mengimplementasikannya dengan baik, meski tetap harus dijaga dan terus ditingkatkan lagi. Penelitian audit ini menghasilkan temuan bahwa sistem informasi yang ada di BPKAD Sumatera Selatan belum sesuai dengan standar dari framework COSO.

**Kata Kunci : Audit,Coso,Teknologi Informasi**

# DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>1</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Batasan Masalah .....	4
1.4 Tujuan Penelitian .....	4
1.5 Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Audit .....	6
2.1.1 Fungsi Audit .....	6
2.1.2 Jenis-Jenis Audit.....	7
2.1.3 Tahap Audit.....	9
2.1.4 Tujuan Audit .....	10
2.2 Audit Teknologi Informasi.....	11
2.3 Framework COSO .....	13
2.3.1 Tujuan Dan Cakupan Framework COSO .....	15
2.3.2 Komponen COSO Internal Control Framework .....	16
2.3.3 Prinsip pada COSO.....	17
2.4 Penelitian Terdahulu .....	19
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
3.1 Metode Penelitian .....	23
3.2 Tempat Penelitian .....	23

3.3	Bahan Audit.....	24
3.4	Sumber Data.....	25
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	26
3.6	Tahapan Penelitian.....	27
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>33</b>
4.1	Latar Belakang Objek Penelitian.....	33
4.1.1	Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah .....	33
4.1.2	Struktur Organisasi .....	34
4.1.3	Visi, Misi Organisasi .....	37
3.2	Gambaran Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah .....	37
3.2.1	Gambaran sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) .....	37
3.2.2	Gambaran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).....	38
3.2.3	Gambaran Tampilan Website Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan .	40
3.3	Pemeriksaan Pendahuluan.....	40
3.3.1	Mengklarifikasi Alasan Untuk Audit.....	40
3.3.2	Memilih Model Audit .....	41
3.3.3	Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan .....	41
3.3.4	Memutuskan Apa yang Akan di Audit .....	44
3.4	Pemeriksaan Terperinci.....	45
3.4.1	Fitur dan prosedur SIMDA .....	46
3.4.2	Fitur dan prosedur SIPD .....	50
3.5	Pengujian Kesesuaian .....	56
3.5.1	Identifikasi pertanyaan Audit menggunakan Framework COSO.....	56
3.6	Pengujian Kebenaran antara penerapan teknologi informasi yang ada di BPKAD sumsel dengan Framework COSO.....	61
3.6.1	Deskripsi kebenaran teknologi informasi dengan framework COSO pada domain control environment (lingkungan pengendalian) .....	61
3.6.2	Deskripsi kebenaran teknologi informasi dengan framework COSO pada domain risk assessment (penilaian risiko).....	62

3.6.3	Deskripsi kebenaran teknologi informasi dengan framework COSO pada domain control activity (pengendalian aktivitas).....	63
3.6.4	Deskripsi kebenaran teknologi informasi dengan framework COSO pada domain information and communication (informasi dan komunikasi) .....	65
3.6.5	Deskripsi kebenaran teknologi informasi dengan framework COSO pada domain monitoring (Pemantauan).....	66
3.7	Pelaporan Hasil audit .....	66
3.7.1	Rekomendasi .....	67
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
5.1	Simpulan .....	69
5.2	Saran .....	70
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>71</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2. 1 Framework COSO .....	15
Gambar 3. 1 Lokasi Penelitian .....	24
Gambar 3. 2 Tahapan Penelitian.....	28
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.....	35
Gambar 4. 2 Tampilan Awal SIMDA.....	38
Gambar 4. 3 Tampilan Setelah Login .....	38
Gambar 4. 4 Tampilan Awal SIPD.....	39
Gambar 4. 5 Tampilan SIPD Setelah Login.....	39
Gambar 4. 6 Tampilan Website BPKAD SUMSEL.....	40
Gambar 4. 7 Menu Data Entry SKPD SIMDA .....	46
Gambar 4. 8 Data Jurnal SIMDA .....	47
Gambar 4. 9 Tampilan Kode Rekening SIMDA.....	48
Gambar 4. 10 Kode Rekening Belanja Langsung dan Tidak Langsung.....	48
Gambar 4. 11 Menu Jurnal Keuangan .....	49
Gambar 4. 12 Menu Hasil Inputan Jurnal .....	50
Gambar 4. 13 Halaman Utama User SIPD.....	50
Gambar 4. 14 Menu Tahun Rencana Pelaksanaan .....	51
Gambar 4. 15 Halaman Dashboard.....	52
Gambar 4. 16 Data Bidang Urusan.....	53
Gambar 4. 17 Data Program.....	53
Gambar 4. 18 Data Sub Kegiatan .....	54
Gambar 4. 19 Data Akun .....	54
Gambar 4. 20 Input Akun.....	55
Gambar 4. 21 Jadwal Tahapan .....	55
Gambar 4. 22 Input Jadwal Tahapan .....	56

## DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Prinsip-Prinsip Framework COSO.....	17
Table 4. 1 Tabel Kesesuaian domain Control Environment (Lingkungan Pengendalian) .....	57
Table 4. 2 Tabel Kesesuaian domain Risk Assessment (Penilaian Risiko) .....	58
Table 4. 3 Tabel Kesesuaian domain Control Activity (Pengendalian Aktivitas .....	59
Table 4. 4 Tabel Kesesuaian domain Information & Communication (Informasi & Komunikasi) .....	60
Table 4. 5 Tabel Kesesuaian domain Monitoring (Pemantauan) .....	60
Table 4. 6 Rekomendasi Hasil Audit .....	67

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaiannya (Mulyadi, 2014). Menurut Arens, et al 2014), audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti yang terkait dengan informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kepatuhan informasi dengan kriteria yang telah ditentukan. Audit dilakukan dengan proses yang sistematis, yakni berupa proses terstruktur, terorganisir, terencana yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti secara objektif tanpa memihak. Audit memiliki beberapa jenis audit, salah satunya adalah audit teknologi informasi.

Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam Instansi itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi Instansi itu telah bekerja secara efektif, dan integratif dalam mencapai target organisasinya.

Audit sistem informasi sangatlah penting untuk mendukung perkembangan Instansi dari waktu ke waktu agar Instansi dapat mengetahui apakah teknologi informasi yang digunakan relevan atau mampu menjawab kebutuhan Instansi atau tidak. Dasar dilakukannya audit sistem informasi agar Instansi lebih memperhatikan masalah perkembangan sistem dan dapat mengevaluasi bagaimana tingkat kesesuaian aplikasi sistem informasi dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa standar teknologi informasi untuk audit seperti *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)*, *IT Balance Scorecard*, *Control Objective for Information Technologies (COBIT)*. Namun COSO fokus kepada pengontrolan aktivitas bisnis dan berfungsi untuk membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses bisnis suatu organisasi. Pemilihan framework ini dikarekan kelebihanannya yaitu sudah ada di dalam frameworknya pengendalian internal dari proses manajemen dasar yaitu Penilaian Resiko (*Risk Assessment*) Kegiatan Pengendalian (*Control Activiities*) Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activites*) Lingkungan Kontrol (*Control environtmentt*) Pengecekan (*Monitoring*) Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*).

Alasan penulis melakukan audit dengan menggunakan framework COSO di karenakan COSO dapat membantu Instansi mencapai tujuan dan mengoptimalkan kinerja organisasi dengan nilai-nilai kebijakan, Serta sistem kontrol yang dianggap tepat untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut. Karena itulah COSO dapat membantu auditor dalam menyeimbangkan tujuan organisasi dan sasaran kinerja dengan menggunakan pengendalian-pengendalian yang ada.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan organisasi yang mengelola keuangan dan aset daerah, kegiatannya yaitu seperti perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pemantauan keuangan daerah (himpunan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (2011).

Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menggunakan teknologi dalam melakukan pekerjaannya salah satunya adalah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), tim IT serta teknologinya.

Adapun tujuan teknologi Informasi ini adalah Membantu pemerintah daerah untuk mempermudah dalam pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pemantauan keuangan serta pertanggungjawaban. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah memerlukan audit terhadap teknologi informasinya karena didalam teknologi informasinya belum pernah diadakannya pengauditan, Selain itu semakin berkembangnya teknologi informasi akan menjadi ancaman-ancaman yang terjadi dari dalam maupun dari luar Instansi. Untuk mencegah ancaman-ancaman tersebut maka dilakukanlah pengauditan menggunakan framework COSO untuk dapat membantu dan memeriksa. Untuk dapat mengetahui apakah pengendalian tersebut telah mencapai tujuannya sehingga penelitian ini diharapkan mampu membantu dan memastikan keakuratan data informasi serta laporan yang sejalan dengan standar peraturan audit.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari konteks yang sudah dijelaskan, Adapun rumusan didalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana hasil audit teknologi informasi di BPKAD menggunakan framework COSO.

## **1.3 Batasan Masalah**

Adapun batasan didalam penelitian ini adalah:

1. Ruang lingkup penelitian ini di lakukan pada sistem Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Sumatera Selatan
2. Difokuskan untuk melaksanakan audit di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Sumatera Selatan pada Sistem Informasi
3. Responden dalam penelitian yaitu seluruh pegawai dan staff yang ada di BPKAD Sumatera selatan

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan yang telah diuraikan, Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk melakukan audit teknologi informasi pada BPKAD menggunakan framwork COSO dan memberikan hasil audit.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penelitian ini yaitu;

1. Sebagai bahan masukan kepada BPKAD Sumatera Selatan dan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja keamanan menggunakan audit.
2. Institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat telah sesuai ataupun memenuhi kriteria Instansi.
3. Institusi dapat mengetahui risiko-risiko yang masih ada dan saran dalam penanganannya.
4. Untuk mengukur dan meninjau laporan keuangan BPKAD serta dapat membuktikan menjadi instansi yang taat pada hukum dan peraturan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **1.1 Audit**

Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi secara objektif bukti audit yang berkaitan dengan laporan kegiatan dan peristiwa ekonomi, untuk menentukan tingkat kesesuaian antara laporan tersebut dengan laporan keuangan lainnya, kriteria yang ditetapkan, serta memberikan hasil kepada pengguna yang berkepentingan (Mulyadi, 2014).

Audit dilakukan untuk menelaah secara sistematis dan material atas laporan keuangan yang disusun oleh manajemen independen, serta akuntansi dan dokumen pendukungnya, agar dapat menyatakan pendapat, opini tentang kejujuran. dari laporan keuangan atau laporan. (Sukrisno, 2012)

##### **1.1.1 Fungsi Audit**

Menurut Institute of Internal Auditors (IIA,) fungsi audit internal didalam organisasi adalah untuk membantu melindungi aset dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan penipuan, meningkatkan efisiensi dalam operasi, meningkatkan keandalan dan integritas keuangan, memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, menetapkan prosedur monitoring

Sedangkan fungsi audit internal dalam mewujudkan *good corporate governance* adalah untuk memaksimalkan value bisnis Instansi dengan cara meningkatkan prinsip-prinsip good corporate governance seperti *Transparency*

(keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian) dan *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran) dalam pelaksanaan kegiatan bisnis.

Untuk mengaudit diperlukan pihak ketiga yang independen untuk memberikan penilaian atas kewajaran sebuah laporan dari audit. Pihak yang independen tersebut adalah auditor independen, audit yang dilakukan oleh auditor independen tersebut merupakan fungsi auditing, yakni untuk menentukan apakah sebuah laporan keuangan telah memenuhi pedoman, kriteria, standar, dan sesuai dengan pertauran serta prinsip akuntansi yang berterima umum. Jadi, dapat disimpulkan bahwa auditing berfungsi untuk meningkatkan atau menurunkan tergantung dari pendapat yang diberikan oleh akuntan derajat kepercayaan pemakai laporan keuangan dalam sebuah laporan keuangan (Restianto, 2011:8).

### **1.1.2 Jenis-Jenis Audit**

Berdasarkan kinerjanya, audit dibagi menjadi audit internal dan audit eksternal. Berdasarkan tujuannya, audit dibagi menjadi audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit kinerja. Sedangkan menurut waktu pelaksanaannya, audit dibagi menjadi audit berkelanjutan dan audit berkala.

- a. Audit internal adalah tinjauan yang dilakukan oleh akuntan internal organisasi atau unit pemantauan internal yang tidak terkait dengan akuntansi dan operasi organisasi. Audit internal merupakan salah satu jenis pengendalian internal untuk menemukan kelemahan-kelemahan penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan operasional organisasi. Hasil dari

audit internal adalah memberikan rekomendasi atau saran perbaikan kepada manajemen.

- b. Audit Eksternal yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh orang luar yang independen. Salah satu tujuan audit eksternal adalah untuk menilai kewajaran laporan keuangan dalam bentuk pernyataan pendapatan akuntan dan memberikan laporan keuangan auditan (*audited financial statement*).
- c. Audit atas Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*) adalah kegiatan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit yang berkaitan dengan laporan suatu entitas untuk menyatakan pendapat apakah laporan telah disajikan secara wajar sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, khususnya akuntansi yang berlaku secara umum.
- d. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*) adalah aktivitas memperoleh dan menelaah bukti audit untuk menentukan apakah aktivitas keuangan atau operasi suatu entitas telah sesuai dengan persyaratan, peraturan, dan regulasi yang berlaku.
- e. Audit Operasional (*Operational Audit*) Aktivitas yang mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai efektivitas dan efisiensi aktivitas entitas.
- f. Audit Kontinu (*Continous Audit*) adalah audit yang dilakukan beberapa kali dalam satu periode akuntansi. Selama audit ini, klien atau badan audit menerima laporan tentang kemajuan kegiatan yang dilakukan dan poin-poin yang perlu diperbaiki atau dicatat.

- g. Audit Berkala (*Periodical Audit*) adalah audit yang dilakukan secara berkala, yaitu triwulanan, semesteran, atau tahunan. Dalam audit ini, laporan audit akhir hanya akan disiapkan pada akhir periode akuntansi (Restianto, 2011).

### **1.1.3 Tahap Audit**

Dalam melaksanakan audit sistem informasi, auditor harus melaksanakan tahap-tahap audit. Ron Weber menyatakan lima tahap audit sistem informasi, yaitu :

1. Tahap pemeriksaan pendahuluan,  
auditor melakukan audit terhadap susunan, struktur, prosedur, dan cara kerja komputer yang digunakan perusahaan. Di dalam tahap ini, auditor dapat memutuskan untuk meneruskan audit atau mengundurkan diri/menolak meneruskan auditnya. Namun, jika audit sudah terlanjut dilaksanakan, auditor dapat memberikan pendapat kualifikasi.
2. Tahap pemeriksaan terperinci,  
tahap ini dapat dilakukan jika auditor memutuskan untuk melanjutkan auditnya. Dalam tahap ini, auditor berupaya mendapatkan informasi secara lebih mendalam untuk memahami pengendalian internal yang diterapkan dalam sistem komputer klien.
3. Tahap pengujian kesesuaian  
Untuk mengetahui apakah struktur pengendalian internal yang ditetapkan telah diterapkan dengan sebagaimana mestinya atau tidak.
4. Tahap pengujian kebenaran  
bukti adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup kompeten sehingga auditor dapat memutuskan apakah risiko yang material dapat terjadi atau

tidak selama pemrosesan data di komputer. Pada tahap ini pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- a. Mengidentifikasi kesalahan dalam pemrosesan data.
  - b. Menilai kualitas data.
  - c. Mengidentifikasi inkonsistensi data.
  - d. Membandingkan data dengan perhitungan fisik.
  - e. Mengonfirmasi data dengan sumber-sumber dari luar perusahaan.
5. Tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian, auditor diharapkan telah dapat memberikan penilaian apakah bukti yang diperoleh dapat atau tidak mendukung informasi yang diaudit (Restianto, 2011:15)

#### **1.1.4 Tujuan Audit**

Adapun tujuan dari audit sistem informasi menurut Ron Weber, (1999) yaitu:

a. Mengamankan Aset

Dalam suatu Instansi, aset informasi seperti perangkat keras, perangkat lunak, sumber daya manusia, dan file data harus dipelihara oleh sistem pengendalian internal yang baik untuk mencegah penyalahgunaan aset.

b. Menjaga Integritas Data

Integritas data adalah salah satu konsep dasar sistem informasi. Data memiliki sifat-sifat tertentu seperti kelengkapan, kebenaran dan kebenaran.

c. Efektifitas Sistem

Efektivitas sistem informasi suatu Instansi memiliki peranan penting dalam proses pengambilan keputusan. Suatu sistem informasi dapat dikatakan efektif jika memenuhi kebutuhan penggunanya.

d. Efisiensi Sistem

Efisiensi menjadi sangat penting ketika komputer kehabisan ruang.

e. Ekonomis

Ekonomis mencerminkan kalkulasi untuk rugi ekonomi (cost/benefit) yang lebih bersifat kuantifikasi nilai moneter (uang).

## **1.2 Audit Teknologi Informasi**

Audit TI merupakan bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit TI dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Sebelumnya istilah audit TI ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit TI secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam Instansi itu. Audit teknologi informasi diasosiasikan dengan auditor yang menggunakan berbagai keahlian dan pengetahuan teknis untuk melakukan audit melalui sistem komputer, melekat dalam berbagai teknologi (Singleton, 2011) dalam Andry 2017:2). Informasi sebagai objek audit, diperoleh auditor dari prosedur sistematis yang disebut sistem informasi dengan berbagai keahlian dan pengetahuan teknis yang dimiliki auditor. Berdasarkan definisi tersebut audit TI adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur

teknologi informasi secara menyeluruh yang diasosiasikan dengan auditor untuk melakukan audit.

Penerapan audit teknologi informasi tentunya memiliki hal yang harus dicapai atau dihasilkan serta manfaat dari audit teknologi informasi. Tujuan diterapkannya audit teknologi informasi yaitu:

1. Availability, ketersediaan informasi, apakah informasi pada Instansi dapat menjamin ketersediaan informasi dapat dengan mudah tersedia setiap saat.
  2. Confidentiality / kerahasiaan informasi, apakah informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi Instansi hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang berhak dan memiliki otoritasi.
  3. Integrity, apakah informasi yang tersedia akurat, handal, dan tepat waktu.
- Manfaat yang diperoleh organisasi ketika menerapkan audit teknologi informasi yaitu:

**a. Manfaat pada saat Implementasi (*Pre-Implementation Review*)**

1. Institusi dapat mengetahui apakah sistem yang telah dibuat sesuai dengan kebutuhan ataupun memenuhi acceptance criteria.
2. Mengetahui apakah pemakai telah siap menggunakan sistem tersebut.
3. Mengetahui apakah outcome sesuai dengan harapan manajemen.

**b. Manfaat setelah sistem live (*Post-Implementation Review*)**

1. Institusi mendapat masukan atas risiko-risiko yang masih ada dan saran untuk penanganannya.

2. Masukan-masukan tersebut dimasukkan dalam agenda penyempurnaan sistem, perencanaan strategis, dan anggaran pada periode berikutnya.
3. Bahan untuk perencanaan strategis dan rencana anggaran di masa mendatang.
4. Memberikan reasonable assurance bahwa sistem informasi telah sesuai dengan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan.
5. Membantu memastikan bahwa jejak pemeriksaan (audit trail) telah diaktifkan dan dapat digunakan oleh manajemen, auditor maupun pihak lain yang berwenang melakukan pemeriksaan. (ITGI, Audit IT - IT Governance Indonesia | ITGID | Audit IT, 2015).

### **1.3 Framework COSO**

Pada Oktober 1985, *The National Commission on Fraudulent Financial Reporting* (yang juga dikenal dengan sebutan *The Treadway Commission Report*) menghasilkan Kerangka atau Model Pengendalian Internal yaitu *COSO framework* atau *model of internal control*. *COSO (Committee of Sponsoring Organization)* merupakan komite yang diselenggarakan oleh lima organisasi profesi, yaitu: *Institute of Internal Auditors (IIA)*, *The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)*, *The Institute of Management Accountants (IMA)*, *Financial Executives International (FEI)*, dan *The American Accounting Accountants (AAA)* (Gondodiyoyo, 2007). COSO menerbitkan definisi tentang pengendalian internal pada tahun 1992. COSO memandang pengendalian internal sebagai serangkaian tindakan yang melintasi seluruh organisasi. COSO juga menjelaskan bahwa

pengendalian internal merupakan bagian dari proses manajemen inti, yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan. Internal kontrol bukanlah sesuatu yang ditambahkan ke proses manajemen, tetapi merupakan bagian integral dari proses.

Model COSO merupakan salah satu model pengendalian intern yang banyak digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengendalian intern (Gondodiyoyo, 2007). Menurut model COSO (2013), pengendalian internal adalah suatu proses yang mengikutsertakan seluruh anggota organisasi dengan tiga tujuan utama, yaitu: efektivitas dan efisiensi operasi, meningkatkan keandalan kegiatan organisasi, pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan. Artinya dengan adanya sistem pengendalian intern, suatu Instansi diharapkan dapat beroperasi atau beroperasi secara efisien dan efektif, penyajian informasi dapat dianggap benar dan para pihak mentaati segala peraturan dan kebijakan yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan. dan kebijakan Instansi. atau peraturan pemerintah (legal/ilegal). Dengan mengikuti peraturan dan kebijakan, penyimpangan dapat dihindari (Gondodiyoyo, 2007). Model daripada COSO dapat dilihat pada Gambar 2.1.



**Gambar 2. 1 Framework COSO**

### **1.3.1 Tujuan Dan Cakupan Framework COSO**

Pada Gambar 2.1, sisi depan menunjukkan lima komponen utama dari COSO Internal Control yang menjadi fokus utama dari penelitian ini. Pada sisi samping menunjukkan entitas atau pada tingkat mana saja komponen COSO Internal Control akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pada sisi atas menunjukkan gambaran umum tujuan dari organisasi yang ingin dicapai. Jika dilihat pada sisi atas Gambar 2.1 tersebut terdapat tiga kategori tujuan dari COSO Internal Control (COSO, 2013). Ketiga tujuan tersebut, antara lain:

1. Efektivitas dan efisiensi operasional
2. Keandalan informasi keuangan
3. Mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku

Pada sisi samping dari Gambar 2.1 memperlihatkan area cakupan atau tingkatan organisasi di mana pengendalian internal dilaksanakan. Berdasarkan gambar tersebut ada empat area atau tingkatan yang terkait dengan pengendalian internal, yaitu Entity Level, Division, Operating Unit, dan Function.

### 1.3.2 Komponen COSO Internal Control Framework

Pada Gambar 2.1 terlihat bahwa COSO Internal Control Framework memiliki lima komponen utama. Komponen-komponen ini bersifat holistik dan saling terintegrasi antara satu dengan lainnya, komponen tersebut antara lain Control Environment, Risk Assessment, Control Activity, Information and Communication, dan Monitoring Activities (COSO, 2013). Dalam sistem pengendalian internal yang efektif, lima komponen tersebut harus dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan rilis terbaru dari COSO Internal Control pada tahun 2013, kelima komponen tersebut kemudian dibagi lagi menjadi 17 prinsip sistem pengendalian internal (COSO, 2013). Dengan mengacu pada COSO, (2013) dan Janvrin, et al., (2012), berikut beberapa penjelasan mengenai komponen dari COSO Internal Control dan prinsip-prinsip yang terdapat pada komponen tersebut yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (Control Environment)

Lingkungan pengendalian adalah rangkaian standar, proses dan struktur yang menjadi dasar dalam pelaksanaan *internal control* di seluruh organisasi.

2. Penilaian Risiko (Risk Assessment)

Penilaian risiko melibatkan proses yang dinamis dan berulang untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko untuk mencapai tujuan, serta membentuk dasar mengenai bagaimana risiko harus dikelola.

3. Kegiatan Pengendalian (Control Activities)

Aktivitas Pengendalian merupakan tindakan yang ditetapkan dengan prosedur dan kebijakan untuk meyakinkan bahwa manajemen telah mengarah untuk memitigasi risiko dalam rangka pencapaian tujuan.

4. Informasi dan Komunikasi (Information and Communication)

Informasi diperlukan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab *internal control* nya dalam rangka pencapaian tujuan. Sedangkan komunikasi terjadi baik secara internal maupun eksternal dengan menyediakan informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sehari-hari.

5. Kegiatan Pemantauan (Monitoring Activities)

Evaluasi berkelanjutan, terpisah, atau kombinasi keduanya untuk memastikan seluruh komponen *internal control* ada dan berfungsi.

**1.3.3 Prinsip pada COSO**

Menurut sebuah artikel oleh Protiviti (2014), yang berjudul The Updated COSO Internal Control Framework: Frequently Asked Questions, edisi ketiga, COSO Framework mengatur dokumen penjelasan menurut 17 prinsip yang disusun menjadi lima bahan. Prinsip ini digunakan untuk membantu pengguna lebih memahami efektivitas pengendalian internal sehingga due diligence tepat dan diposisikan untuk mengukur efektivitas. 17 prinsip tercantum di bawah ini dan dikelompokkan berdasarkan komposisi COSO saat ini:

*Table 2. 1 Prinsip-Prinsip Framework COSO*

<b>Komponen</b>	<b>Prinsip</b>
<b>Control environment</b>	1. Organisasi menunjukkan komitmen terhadap nilai integritas dan etika.

Komponen	Prinsip
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Direksi menunjukkan independensi dalam manajemen dan melakukan pengawasan atas pengembangan dan pengoperasian pengendalian internal.</li> <li>3. Dibawah pengawasan Dewan direksi, direksi menetapkan struktur, pelaporan, wewenang dan tanggung jawab yang tetap untuk pencapaian tujuan.</li> <li>4. Organisasi menunjukkan komitmen untuk bisa menarik, mengembangkan dan mempertahankan orang-orang yang kompeten selaras dengan tujuannya.</li> <li>5. Organisasi mempertahankan orang yang bertanggung jawab dalam pengendalian internal mereka dalam mengejar tujuan.</li> </ol>
<b>Risk Assesment</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>6. Organisasi menetapkan tujuan yang cukup jelas untuk memungkinkan identifikasi dan penilaian risiko yang terlibat.</li> <li>7. Organisasi mengidentifikasi risiko untuk mencapai tujuannya di seluruh organisasi dan menganalisisnya sebagai dasar untuk menentukan manajemen risiko.</li> <li>8. Organisasi harus memperhitungkan kemungkinan terjadi kecurangan (<i>fraud</i>) dalam menilai risiko pencapaian tujuannya.</li> <li>9. Organisasi mengidentifikasi dan mengevaluasi perubahan yang secara signifikan dapat mempengaruhi sistem pengendalian internalnya.</li> </ol>
<b>Control Activities</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>10. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian yang dapat mengurangi risiko pencapaian tujuan ke tingkat yang bisa diterima.</li> <li>11. Organisasi memilih dan mengembangkan aktivitas pengendalian bersama (<i>common control</i>) melalui teknologi untuk mendukung pencapaian tujuannya.</li> <li>12. Organisasi menerapkan aktivitas pengendalian sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan untuk menetapkan apa yang diharapkan, dan prosedur yang terlibat untuk mengimplementasikan kebijakan.</li> </ol>
<b>Information and Communication</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>13. Organisasi mengumpulkan atau menghasilkan dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung operasi komponen pengendalian internal lainnya</li> <li>14. Organisasi mengomunikasikan informasi internal, termasuk mengomunikasikan tujuan dan tanggung jawab pengendalian internal, yang diperlukan untuk mendukung operasi bagian lain dari pengendalian internal.</li> <li>15. Organisasi berkomunikasi dengan pihak eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi operasi bagian lain dari pengendalian internal.</li> </ol>
<b>Monitoring Activities</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>16. Organisasi memilih untuk mengembangkan dan melakukan audit berkelanjutan dan/atau audit terpisah untuk memverifikasi apakah komponen pengendalian internal ada dan beroperasi.</li> <li>17. Organisasi mengevaluasi dan segera mengomunikasikan kelemahan pengendalian internal kepada pihak yang tepat yang bertanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen senior dan dewan direksi.</li> </ol>

#### 1.4 Penelitian Terdahulu

Adapun didalam melaksanakan penelitian ini terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan framework COSO sehingga menjadi pedoman dalam penelitian ini, penelitian tersebut yaitu sebagai berikut.

Jurnal tersebut berjudul Audit Teknologi Informasi di PT XYZ Menggunakan *Framework Committee of the Trail Committee Sponsoring Organizations (COSO)*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah sistem yang dilengkapi dengan pengontrol berfungsi dengan baik dan benar. Standar pengendalian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Committee on Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO)* yang meliputi *Control Environment, Risk Assessment, Control Activity, Information and Communication component, Communication and Monitoring*. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kapasitas pada PT XYZ untuk layanan teknologi informasi berada pada level 4 (*predictable process*) dengan nilai 4,17. Hasil tersebut menunjukkan bahwa proses atau aktivitas TI PT XYZ telah dilaksanakan secara konsisten dan terdapat batasan-batasan yang ditetapkan oleh Instansi. Nilai level yang diharapkan tercapai berada pada level 5 (proses optimasi). Perbedaan hasil derajat ini terjadi karena departemen TI PT XYZ tidak melakukan *monitoring* dan evaluasi tambahan untuk mendukung bisnis Instansi.

Jurnal tersebut berjudul Evaluasi Pengendalian Terapan dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan Menggunakan Kerangka Kerja COSO. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengurangi risiko, penyalahgunaan penipuan dan meningkatkan kinerja aplikasi dan jika risiko ini terjadi, tingkat kerugian harus

diminimalkan. Pendekatan yang diterapkan adalah metode audit terkomputerisasi, yaitu langkah input, proses dan output dilakukan langsung pada aplikasi atau sistem informasi. Hasil evaluasi aplikasi pengendalian sistem informasi manajemen keuangan kabupaten Banyuwangi mendapat skor 84,5 dengan kriteria evaluasi baik. Kontrol aplikasi dapat digunakan untuk memperbaiki kerentanan dalam sistem informasi yang dikembangkan, menjaga keamanan data dan informasi, dan mengurangi risiko bahwa sistem informasi dapat membahayakan pemangku kepentingan, dan menjaga kelangsungan sistem informasi.

Jurnal tersebut berjudul Analisis Sistem Akuntansi Penagihan Kas Berdasarkan 5 Model COSO Pada Koperasi Unit Desa (Kud) Sri Mulyo. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas KUD Sri Mulyo berdasarkan 5 komponen pengendalian internal versi Trail Committee Sponsoring Organization (COSO). Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis data komparatif tetap yang membandingkan seberapa cocok teori dengan data yang diperoleh. Setelah dilakukan analisis data, diketahui bahwa sistem penerimaan kas di KUD Sri Mulyo telah memenuhi 5 komponen COSO dan berjalan dengan efektif. Jurnal tersebut berjudul Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Intern BRI Dengan Kerangka COSO. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan konsep sistem pengendalian intern BIS terhadap komponen-komponen sistem pengendalian intern COSO.

Penelitian ini menggunakan metode literature review, untuk mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal pada Bank BRI dan pengendalian internal COSO (Committee on Sponsoring Organizations of the Trail Committee). Kajian ini menyajikan hasil dan menyimpulkan bahwa penerapan pengendalian intern pada Bank BRI telah sesuai dengan konsep dalam Pengendalian Intern - Integrated Framework yang diterbitkan oleh Sponsoring Organizations Committee (COSO) Treadway Commission, namun dalam praktiknya masih terdapat prinsip-prinsip yang belum dilaksanakan dengan benar. Kesesuaian khususnya bahwa dalam komposisi lingkungan pengendalian internal masih terdapat kecurangan yang melibatkan bagian internal Instansi dan komponen pengawasan pengendalian dan tindakan korektif Pengendalian internal masih banyak temuan auditor eksternal yang belum terselesaikan (di bawah pemantauan).

Jurnal tersebut bernama COSO Internal Audit Framework untuk mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal atas pengelolaan persediaan bahan baku di PT. MGFI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan pengendalian internal terhadap persediaan bahan baku di PT. MGFI mematuhi standar Kerangka Integrasi COSO ERM (Committee of Trail Funding Organizations). Penelitian ini dilakukan karena PT. MGFI memiliki sejumlah masalah persediaan material yang dapat timbul dari pengendalian persediaan internal yang tidak efektif. Penelitian ini dilakukan oleh PT Mega Global Food Industri di wilayah Driyorejo, Gresik. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pengendalian persediaan. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan *checklist*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian internal atas persediaan bahan baku

pada PT. MGFI terutama sesuai dengan delapan komponen pengendalian internal di bawah kerangka COSO ERM terintegrasi, dengan tingkat 75,1%, dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian internal atas stok material di PT. Kategori kinerja MGFI.

Berdasarkan penelitian terdahulu menjelaskan tentang perbedaan dari beberapa penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, maka dari itu atas dasar perbandingan tersebut saya melakukan penelitian tentang audit teknologi Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah menggunakan Framework Committee of sponsoring organization of the treadway commission (COSO). Data diperoleh dari wawancara, observasi, dan kepustakaan. Dengan audit sistem informasi diharapkan mampu memberikan suatu evaluasi yang kemudian menghasilkan suatu rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal yang ada pada teknologi informasi di BPKAD Sumatera Selatan.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Metode yang dipakai pada penelitian yaitu evaluasi, metode evaluasi digunakan dikarenakan dapat mencari informasi yang berharga (informasi, produksi dan prosedur tertentu) dan sebagai proses merencanakan, memperoleh serta menyediakan informasi (data) yang diperlukan sebagai dasar membuat alternatif keputusan (Abdullah, 2018:27).

Dengan demikian suatu kegiatan harus dapat diukur hasil dan dampaknya, dengan membandingkan tujuan yang sudah ditetapkan dengan cara organisasi dalam mencapainya. Tujuan dari metode evaluasi dalam penelitian ini yaitu dapat mengetahui efektifitas penyelenggaraan Sistem Informasi serta mengetahui kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman dalam Sistem Informasi Metode evaluasi juga dapat melihat apakah yang sudah dirumuskan, dibangun serta dilaksanakan sebagaimana mestinya, sekaligus digunakan mengetahui dampaknya.

#### **3.2 Tempat Penelitian**

Adapun penelitian dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) beralamat Jl. Kapten A. Rivai No. 51, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127.



**Gambar 3. 1 Lokasi Penelitian**

### **3.3 Bahan Audit**

Didalam melakukan audit sistem informasi banyak hal yang harus dilakukan dan salah satunya yaitu bahan dalam melakukan audit. Telah dijelaskan bahwa bahan audit terbagi atas beberapa bagian yaitu bukti langsung/tidak langsung, bukti utama (primer/sekunder), fakta/bukti hasil analisis dan record/testimonial evidence. Berikut bahan audit yang diperlukan didalam penelitian ini yaitu sebagai berikut;

1. Bukti langsung/tidak langsung.

Bahan bukti yaitu surat balasan tentang pelaksanaan audit di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan, hasil observasi utama berupa data data yang diperlukan didalam penelitian baik data pegawai serta data pengguna yang menggunakan sistem yang akan di audit.

2. Bukti utama (primer)/sekunder.

Bahan bukti utama/sekunder yaitu Tampilan data Sistem Informasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan sebagai bukti

utama untuk melakukan audit didalam penelitian ini. Serta bukti bahwa telah melakukan wawancara terhadap pihak terkait mengenai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan sebagai pokok yang menjadi inti utama dalam melakukan audit.

3. Fakta/Bukti hasil analisis.

Bukti yang didapat didalam hal ini yaitu hasil audit berupa rekomendasi dari auditor mengenai apa yang telah di audit serta berita acara sebagai pendukung bahwa rekomendasi atau bukti hasil analisis telah diterima oleh Instansi.

4. Record/Testimonial Evidence.

Bukti yang terdapat didalam hal ini yaitu hasil wawancara. Wawancara ini diperlukan sebagai bukti pendukung, misalnya untuk menilai bagaimana kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, bukti yang paling valid antara lain adalah dengan melakukan wawancara terhadap pegawai atau organisasi dibawahnya. Adapun auditor melakukan wawancara dengan pihak IT Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan.

### **3.4 Sumber Data**

1. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data didapatkan secara langsung dari pihak pertama, baik berasal dari suatu individu ataupun kelompok. Data primer secara khusus dilakukan menjawab pertanyaan sebuah penelitian. Data primer bisa didapatkan menggunakan metode wawancara atau pengamatan langsung (Observasi). Peneliti melakukan wawancara pada pihak yang terkait dengan

penelitian berdasarkan dengan pertanyaan yang telah disusun berdasarkan dengan standar yang telah ditetapkan. Observasi dilakukan untuk melihat langsung proses dan aktivitas kerja dalam lingkungan penelitian yang diamati, pengamatan langsung akan membantu melengkapi data yang dibutuhkan.

## 2. Data Sekunder.

Data sekunder yaitu data penelitian didapatkan secara tidak langsung melalui media perantara (didapat serta dicatat oleh pihak lain). Penelitian akan dapat semakin dipercaya jika didukung foto-foto yang ada. Dokumen penting baik dalam bentuk tertulis ataupun *softcopy*, foto, gambar ataupun dokumen agar menunjang pada proses penulisan.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi lapangan dan interviem (wawancara) secara langsung di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan, serta pengumpulan data dengan kepustakaan dan dokumentasi. Penjabaran metode pengumpulan data akan dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Wawancara

Merupakan dialog dua arah pada suasana status yang sama, akrab serta tidak formal (Ivanovich Agusta, 2014). Wawancara perlu dilakukan karena data yang diperoleh dari BPKAD Sumatera Selatan haruslah data yang komprehensif dan mendalam agar permasalahan dalam penelitian dapat diketahui dengan jelas.

## 2. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang saling berhubungan, dalam suatu proses yang dimodelkan pada proses biologis dan psikologis yang berbeda. Dari keduanya, yang terpenting adalah tahap pemeriksaan dan refleksi (Sugiyono, 2016). Observasi dilakukan peneliti dengan mengamati sistem informasi BPKAD SUMSEL dengan mengakses dan mengamati secara langsung pengoperasiannya.

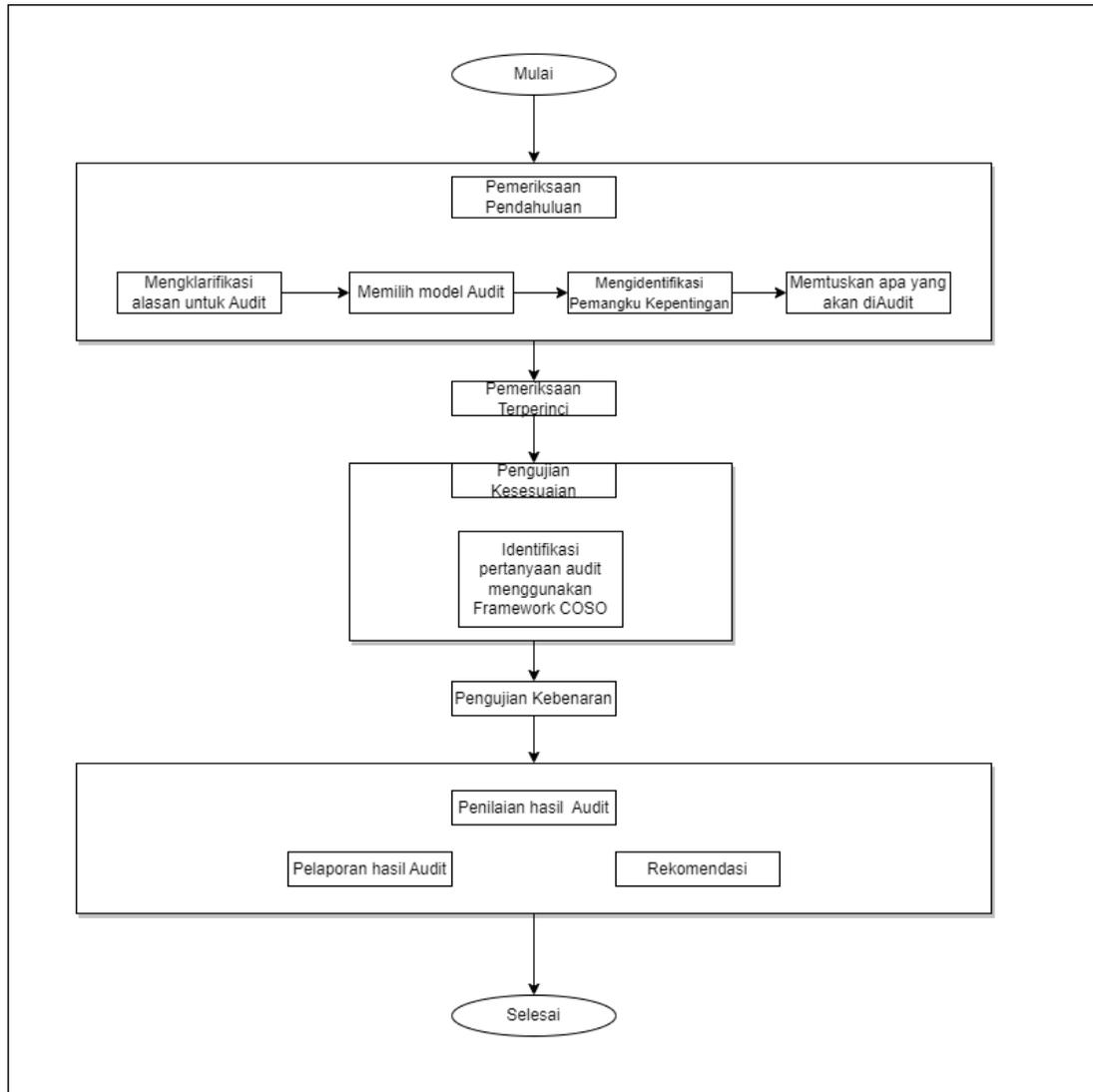
## 3. Dokumentasi

Pendokumentasian adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi berupa buku, catatan, dokumen, angka tekstual dan visual berupa laporan dan informasi yang dapat mendukung bantuan penelitian (Suharasaputra, 2012). Dokumen digunakan untuk mengumpulkan data dan kemudian ditinjau. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain jurnal, buku dan catatan BPKAD.

### **3.6 Tahapan Penelitian**

Tahapan penelitian ini dibuat berdasarkan gabungan dari tahapan metode audit dan tahapan metode evaluasi. Unsur-unsur dari kedua metode dipakai dan disesuaikan

dengan kebutuhan dalam penelitian. Berikut ini adalah tahapan penelitian:



**Gambar 3. 2 Tahapan Penelitian**

### 1. Tahap pemeriksaan pendahuluan

Tahapan ini merupakan perencanaan penelitian, dilakukan untuk melihat apakah pekerjaan audit yang akan dilaksanakan dapat diterima dengan perjanjian

tertentu. Pemeriksaan pendahuluan dilalui dengan beberapa proses. Dalam tahap ini juga dilakukan:

a. Mengklarifikasi alasan untuk audit

Penelitian ini dilakukan dalam minat peneliti untuk melihat bagaimana sistem informasi layanan yang digunakan telah sesuai standar. Kegiatan audit yang dilaksanakan diharapkan dapat memperlihatkan sejauh mana penerapan layanan sistem informasi yang telah dipakai dan diterapkan.

b. Memilih model audit

Memilih model audit yang tepat membutuhkan kehati-hatian dan perlu pertimbangan berdasarkan tujuan penelitian. pemilihan pendekatan audit penting dilakukan agar kegiatan audit menjadi sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan. Ada beberapa model audit dalam tata kelola teknologi informasi yaitu pengelolaan layanan TI, Keamanan Sistem Informasi, Finansial Organisasi, Pengelolaan TI.

c. Mengidentifikasi pemangku kepentingan

Pemangku kepentingan dan *Stakeholders* yang berhubungan dengan layanan sistem informasi yang akan diaudit perlu diidentifikasi agar proses audit menjadi tepat dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pemangku kepentingan dalam hal ini adalah mereka sebagai kepala dan staff anggota UPT Perpustakaan yang telah dikoordinasi dengan penelitian.

d. Memutuskan apa yang akan di Audit

Penelitian ini akan berfokus pada audit Sistem Informasi yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Adapaun framework yang digunakan dalam membantu menilai pengauditan yaitu Framework Commite of sponsoring organization (COSO)

2. Tahap pemeriksaan rinci

Dalam penelitian ini dilakukan pemeriksaan rinci yang bertujuan agar melihat apakah audit yang hendak dilaksanakan tepat dan terarah. Pemahaman atas kebijakan, struktur organisasi, dan proses bisnis organisasi dilakukan dalam tahapan ini. Tahapan ini penting untuk dilakukan karena untuk melihat apakah audit dapat dilanjutkan atau tidak.

3. Tahap pengujian kesesuaian

Dalam pengujian kesesuaian dilakukan untuk melihat kebenaran yang telah dilakukan dalam tahap pemeriksaan terdahulu benar dan sesuai agar audit dapat dilakukan. Pemeriksaan seperti observasi di lingkungan penelitian, melihat sistem informasi layanan, dan dokumen organisasi. Pemeriksaan rinci dilakukan agar data yang diharapkan dapat tercapai dan sesuai sehingga tidak menyebabkan penelitian terhambat karena ketidak sesuain antar pemeriksaan rinci yang dilakukan dengan data atau observasi yang telah dilakukan. Dalam tahap ini juga dilakukan:

a. Mengidentifikasi pertanyaan audit menggunakan Framework COSO  
Dilakukan identifikasi pertanyaan penelitian yang sesuai dan dibutuhkan dalam penelitian untuk mencapai tujuan dari penelitian. Pertanyaan yang dilakukan untuk audit berdasarkan pada framework COSO.

#### 4. Tahap pengujian kebenaran

Pada tahap ini audit dilaksanakan dengan standar yang telah ditetapkan dan disepakati antara auditor dan audite. Tahap ini dilakukan dengan format yang telah dibentuk dari tahap-tahap sebelumnya sehingga dalam tahap ini semua alat penelitian yang telah direncanakan digunakan untuk dijadikan pengujian kebenaran bukti sesuai dengan framework COSO. Dalam tahap ini juga dilakukan pengumpulan dan analisa data, pengumpulan data didasarkan dengan instrumen yang ada. Analisa data dapat dilakukan setelah data telah terkumpul dengan baik dan hasil analisa tersebut akan menjadi laporan.

#### 5. Penilaian hasil Audit

##### a. Pelaporan hasil audit

Berdasarkan temuan yang diperoleh dari hasil analisis, maka disusunlah hasil laporan audit. Disusun dalam laporan audit memuat rancangan, metodologi, temuan serta kesimpulan. Analisa data yang terkumpul dengan tolak ukur sudah dirumuskan sesuai tujuan yang sudah ditetapkan. Hasil temuan berdasarkan atas gambaran sejauh mana audit sistem informasi.

##### b. Rekomendasi

Setelah audit dilaksanakan maka dilakukan penilaian dengan format yang telah direncanakan dapat dalam bentuk rekomendasi perbaikan. Hasil yang didapat berdasarkan bukti yang didapat dari Pengujian bukti yang dilaksanakan dimana hasil yang di dapat menunjukkan sejauh mana penerapan layanan sistem informasi telah diterapkan. Dalam tahap ini pemberian rekomendasi juga merupakan tahapan akhir dari penelitian dengan audit. Rekomendasi dapat dijadikan panduan oleh organisasi agar dapat lebih berkembang sesuai dengan tujuan organisasi dan perkembangan teknologi.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN**

#### **4.1 Latar Belakang Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah**

Pada awalnya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan bernama Biro Keuangan Provinsi Sumatera Selatan yang beralamat di Jl. Kapten Arivai No. 3 Palembang, Biro Keuangan berdiri sejak adanya Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 1959 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 25 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814).

Namun dengan berkembangnya pembangunan dan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat, maka titik berat pembangunan diarahkan ke daerah dan lahirnya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dimana arah pembangunan dititik beratkan di daerah, maka struktur organisasi Pemerintahan Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Sekarang Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan). Dengan telah di undangkannya Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2012 tentang perubahan Ketiga atas di gantinya Biro Keuangan menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang berkantor di Jl. Merdeka No.8 Kelurahan Talang Semut Kecamatan Bukit Kecil Palembang. Dengan di terbitkannya peraturan daerah TK I Sumatera Selatan

Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai pengguna yang baru dengan tugas dan fungsi yang sama maka pada tahun 2012 Biro Keuangan resmi diganti menjadi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah.

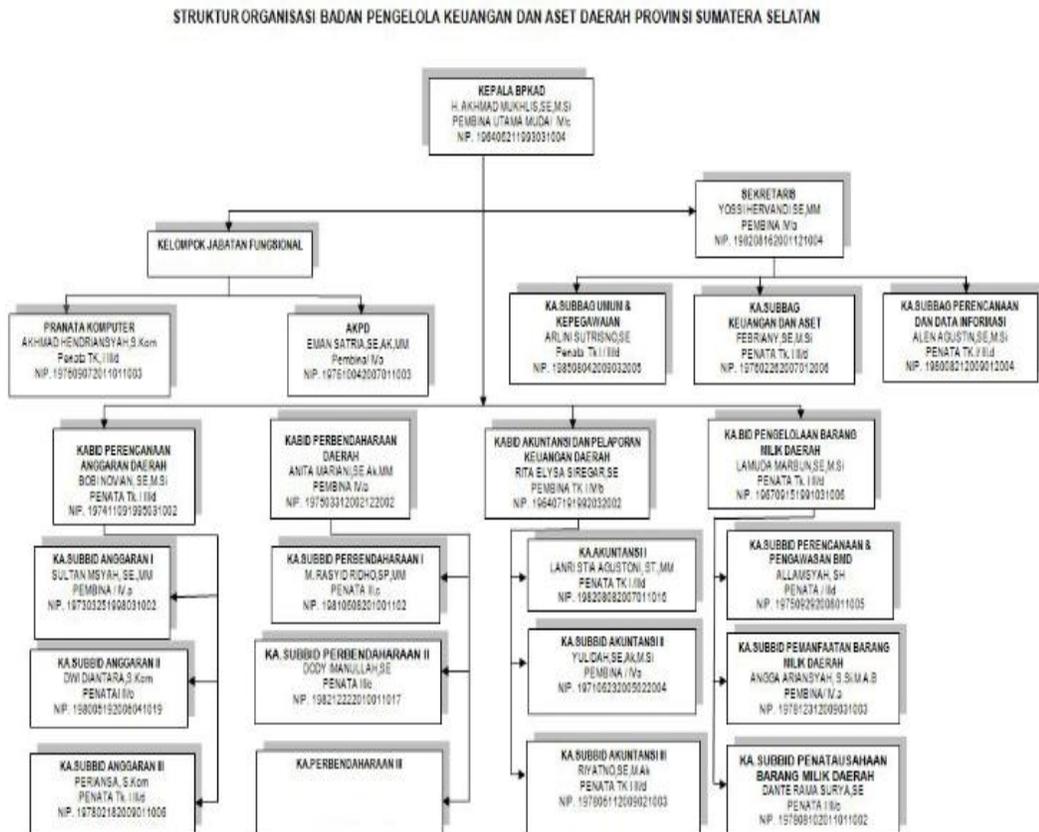
#### **4.1.2 Struktur Organisasi**

Untuk dapat melakukan fungsi serta aktivitasnya suatu Instansi harus mempunyai struktur organisasi yang sesuai dengan kondisi Instansi. Struktur organisasi menunjukkan garis pertanggung jawaban dari masing-masing kedudukan dan jabatan yang ada dalam Instansi atas tugas yang dibebankan kepadanya. Dengan adanya struktur organisasi akan didapat suatu pedoman yang menggambarkan dengan jelas cara pelaksanaan pembagian tugas, tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing bagian dalam kedudukan dan jabatannya.

Struktur organisasi adalah suatu kerangka formil dimana didalamnya terjadi proses manajemen, sebagaimana diketahui bahwa suatu organisasi mempunyai tujuan tertentu dan untuk mencapai tujuan tersebut maka harus ada sistem pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dimana sistem tersebut menggambarkan suatu struktur organisasi. Jadi struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menggambarkan fungsi dari masing-masing individu dan hubungan antara sesama individu atau personil

yang terdapat di dalam suatu organisasi, yaitu hubungan antara pemimpin Instansi dengan bawahan.

Struktur Organisasi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:



**Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Struktur organisasi dan tata kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi

Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
  - c. Sub Bagian Perencanaan dan Data Informasi
3. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah
  - a. Sub bidang Anggaran I
  - b. Sub bidang Anggaran II
  - c. Sub bidang Anggaran III
4. Bidang Perbendaharaan Daerah
  - a. Sub bidang Pembendaharaan I
  - b. Sub bidang Perbendaharaan II
  - c. Sub bidang Perbendaharaan III
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
  - a. Sub bidang Akuntansi I
  - b. Sub bidang Akuntansi II
  - c. Sub bidang Akuntansi III

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - a. Sub bidang Perencanaan dan Pengawasan BMD
  - b. Sub bidang Pemanfaatan Barang Milik Daerah
  - c. Sub bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah

#### **4.1.3 Visi, Misi Organisasi**

- a. Visi  
“Terwujudnya Akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mendukung Sumsel Sejahtera lebih maju dan berdaya saing internasional.”
- b. Misi
  1. Menciptakan kehandalan laporan keuangan dan pengamanan aset daerah.
  2. Menciptakan pelayanan prima bidang keuangan daerah dan aset daerah.

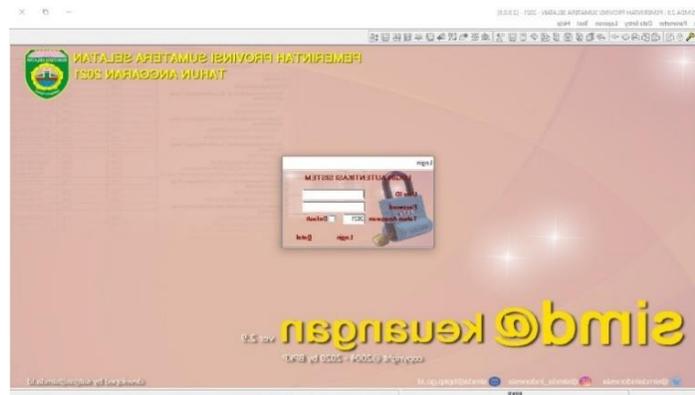
### **3.2 Gambaran Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

#### **3.2.1 Gambaran sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)**

Adapun tampilan sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Ketika di akses menampilkan form login yang mengharuskan pengguna mengisi user ID,password dan tahun anggaran, berikut adalah tampilan SIMDA yang ada di BPKAD Sumatra Selatan.

1. Tampilan awal SIMDA

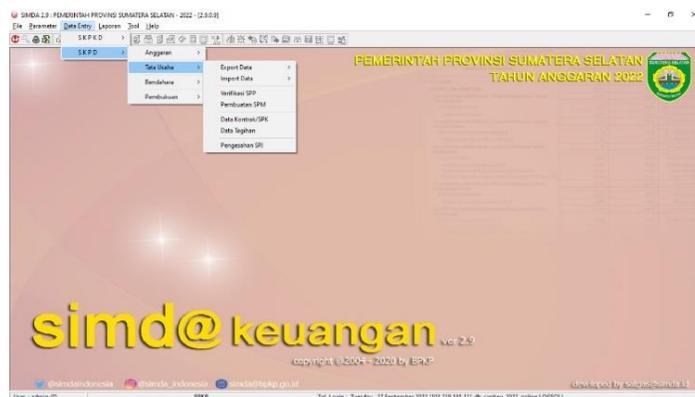
Ini adalah tampilan awal SIMDA yang terdiri dari username dan password :



**Gambar 4. 2 Tampilan Awal SIMDA**

## 2. Tampilan setelah login

Berikut adalah tampilan setelah login yg terdiri dari beberapa menu sebagai berikut:



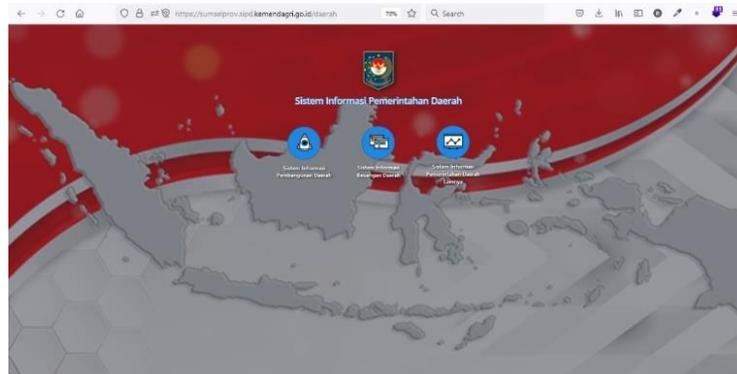
**Gambar 4. 3 Tampilan Setelah Login**

### 3.2.2 Gambaran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Adapun tampilan sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

## 1. Tampilan awal SIPD

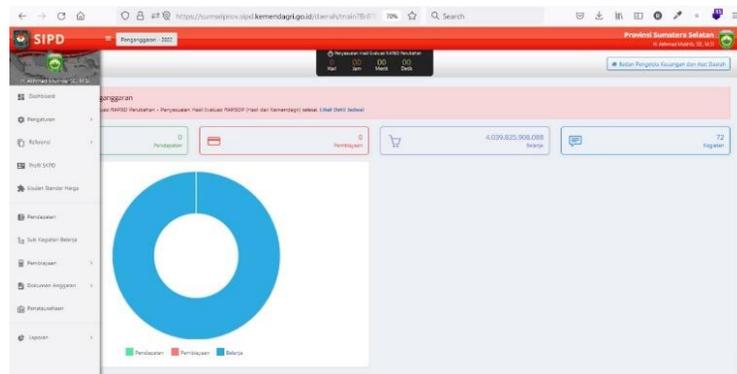
Berikut adalah tampilan awal dari aplikasi SIPD:



**Gambar 4. 4 Tampilan Awal SIPD**

## 2. Tampilan SIPD setelah login

Ini adalah bentuk tampilan SIPD setelah login:



**Gambar 4. 5 Tampilan SIPD Setelah Login**

### 3.2.3 Gambaran Tampilan Website Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

Adapun tampilan website yang ada di BPKAD Sumatra Selatan.



**Gambar 4. 6 Tampilan Website BPKAD SUMSEL**

## 3.3 Pemeriksaan Pendahuluan

Pada tahap pemeriksaan pendahuluan, auditor melakukan klarifikasi dalam pelaksanaan audit, pemilihan model audit, identifikasi pemangku kepentingan dalam organisasi, dan gambaran tentang objek sistem informasi yang akan diaudit.

### 3.3.1 Mengklarifikasi Alasan Untuk Audit

Dalam Pelaksanaan audit yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, pihak auditor melakukan penelitian untuk membantu Instansi mengidentifikasi masalah, risiko, dan kelemahan sistem yang berpotensi membahayakan aset Instansi. Berbekal temuan itu, Instansi dapat mengambil tindakan pencegahan maupun perbaikan. Auditor menggunakan framework yang dapat membantu dalam melakukan audit yaitu menggunakan framework COSO.

### **3.3.2 Memilih Model Audit**

Pada penelitian yang akan dilakukan model audit yang digunakan adalah model dalam lingkup tata kelola TI terutama bidang audit pengelolaan layanan TI memfokuskan diri pada 3 (tiga) tujuan utama, yaitu menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan sekarang dan akan datang dari bisnis dan pelanggannya, memperbaiki kualitas layanan-layanan TI, mengurangi biaya jangka panjang dari pengelolaan layanan-layanan tersebut. Model pendekatan pengelolaan layanan TI karena audit yang dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan terkait pelaksanaan manajemen layanan sistem informasi yang ada

### **3.3.3 Mengidentifikasi Pemangku Kepentingan**

Struktur organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memperlihatkan kerangka serta susunan perwujudan pola hubungan antara tiap fungsi bahwa memiliki pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan berbeda dikoodinasikan.

#### **1. Tugas Kepala BPKAD**

- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUPA dan PPASP);
- c. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- d. Pelaksanaan fungsi BUD;

- e. Penyusunan laporan keuangan daerah yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

## 2. Fungsi Kepala BPKAD

- a. Pengesahan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD;
- b. Pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- d. Pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank yang telah ditunjuk;
- e. Pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. Penyimpanan uang daerah;
- g. Penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
- h. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
- i. Pelaksanaan proses usulan penunjukan pengelolaan keuangan daerah;
- j. Pengendalian penerimaan dan pengeluaran kas;
- k. Pelaksanaan rekonsiliasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
- l. Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP);
- m. Pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK);
- n. Pelaksanaan restitusi/pengembalian kelebihan pendapatan;
- o. Penyiapan kebijakan akuntansi keuangan daerah;

- p. Pelaksanaan sistem akuntansi pelaporan keuangan dan aset daerah;
  - q. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - r. Penyiapan kebijakan, pedoman dan pembinaan pengelolaan aset daerah;
  - s. Pelaksanaan evaluasi rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota;
  - t. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
  - u. Penyajian informasi keuangan dan aset daerah;
  - v. Pengkoordinasian, pengumpulan bahan dan pemrosesan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP-TGR)
3. Tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Data Informasi
- a. Menyusun RKA/RKAP;
  - b. Menyusun DPA/DPPA;
  - c. Menyiapkan laporan kinerja;
  - d. Menyusun kebutuhan anggaran kas;
  - e. Menghimpun data dan menyiapkan bahan perencanaan kerja dan rencana strategis, rencana kerja tahunan;
  - f. Mengkoordinir penyusunan program;
  - g. Mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi implementasi pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Daerah (SIMDA) dan aplikasi lainnya;
  - h. Menyusun dan menyiapkan data dan informasi aplikasi pengelolaan keuangan dan aset;

- i. Menyusun dan menyiapkan jaringan aplikasi;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

### 3.3.4 Memutuskan Apa yang Akan di Audit

Adapun pelaksanaannya akan di lakukan pada proses ini ialah;

1. *Brainware* merupakan pemakai yang mengoperasikan perangkat computer dan yang menggunakan sistem informasinya seperti SIMDA, SIPD serta Website;
  - a. Kepala Dinas BPKAD
  - b. Staff IT BPKAD
  - c. Kasubag BPKAD
2. *Prosedure* merupakan serangkaian operasi yang harus dijalankan dengan cara yang sama agar memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Prosedur yang digunakan ialah prosedur panduan penggunaan atau panduan sistem informasi yang ada di BPKAD
3. *Hardware* merupakan komponen yang membangun struktur sebuah computer Hardware dalam penerapan Sistem Informasi pada BPKAD Sumatra Selatan
  - a. *Hardisk*
  - b. *Flashdisk*
  - c. *Mouse*
4. *Software* merupakan program komputer yang berisi data-data dan informasi yang digunakan untuk melakukan perintah pada sistem yang ada pada komputer. Software pada penerapan sistem informasi pada BPKAD Sumsel
  - a. *Ubuntu Server*

- b. *Apache*
  - c. *MySQL*
5. Jaringan Komputer adalah jaringan komunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling terhubung. Jaringan komputer yang digunakan pada BPKAD Sumsel adalah sebagai berikut:
- a. *Internet Service Provider (ISP) Indihome (Speedy)*
  - b. *Internet Service Provider (ISP) Fiber Star*
6. Komunikasi Data merupakan proses pengiriman dan penerimaan data dari dua atau lebih device. Komunikasi data yang ada pada Tribun Sumsel adalah sebagai berikut:
- a. Komputer
  - b. Laptop
  - c. Handphone

### **3.4 Pemeriksaan Terperinci**

Pemeriksaan terperinci adalah di mana peneliti memutuskan untuk melanjutkan audit terhadap sistem informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumsel. Tahap ini dilakukan setelah tahap pemeriksaan pendahuluan. Dalam tahap ini peneliti berupaya mendapatkan informasi secara lebih mendalam untuk memahami proses yang diterapkan dalam sistem informasi yang ada di BPKAD Sumsel. Informasi yang didapat dari tahap ini adalah fitur-fitur serta prosedur yang terdapat pada sistem informasi yang ada di BPKAD Sumsel.

### 3.4.1 Fitur dan prosedur SIMDA

pembuatan laporan, fungsi pembukuan tidak perlu melakukan proses lain untuk transaksi tahun berjalan selain proses. Dalam hal terdapat transaksi diluar penerimaan dan pengeluaran anggaran maka pencatatan dilakukan pada sub menu Jurnal. Transaksi yang diinput di sub menu ini adalah Jurnal Penyesuaian dan Jurnal Koreksi. Koreksi merupakan kegiatan pembedulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Tindakan koreksi yang dilakukan dengan menggunakan jurnal koreksi dapat dilakukan sepanjang tahun. Sedangkan Penyesuaian merupakan kegiatan pembedulan akuntansi di akhir tahun sehingga pos-pos yang ada di laporan keuangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tindakan penyesuaian yang dilakukan dengan menggunakan jurnal penyesuaian yang biasanya dilakukan pada akhir tahun. Hal-hal yang biasanya akan dilakukan penyesuaian antara lain: saldo kas, persediaan, aktiva dalam pengerjaan, utang, dan piutang. Input data Jurnal dilakukan dengan langkah langkah sebagai berikut :



**Gambar 4. 7 Menu Data Entry SKPD SIMDA**

- a. Klik menu Data Entry SKPKD, pilih sub menu Pembukuan kemudian pilih Jurnal lalu pilih unit organisasi maka akan tampil form Jurnal dibawah ini :

**Gambar 4. 8 Data Jurnal SIMDA**

- b. Isi data Jurnal dengan Klik tombol (Tambah), isi informasi yang dibutuhkan seperti nomor dan tanggal bukti, nomor dan tanggal referensi, nomor bku, dan keterangan serta pilih jenis jurnal. Klik (Simpan) untuk menyimpan data atau klik (Tambah) untuk membatalkan transaksi.
- c. Selanjutnya pilih halaman Jurnal Rincian, klik tombol (tambah), isi kode rekening atau klik  untuk menampilkan data kode rekening belanja langsung/tidak langsung dan kode rekening :

Tombol  pertama untuk menampilkan kode rekening Belanja Langsung/Tidak Langsung.

Pemilihan Kode Rekening

Belanja Langsung | Belanja Tidak Langsung

Program : Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah  
Kegiatan : Pemandangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Rekening	Uraian	Nilai
5.2.1.1.5	Honorarium/Upah Harian	2,400,000
5.2.1.1.6	Honorarium PNS lainnya	198,000,000
5.2.2.1.1	Belanja alat tulis kantor	936,000
5.2.2.6.1	Belanja cetak	2,500,000
5.2.2.6.2	Belanja Penggandaan	450,000
5.2.2.11.2	Belanja makanan dan minuman rapat	10,800,000

Pilih Batal

**Gambar 4. 9 Tampilan Kode Rekening SIMDA**

Tombol  kedua untuk menampilkan kode rekening secara keseluruhan

Pemilihan Kode Rekening

Akun	Kel.	Jns.	Oby.	Uraian Rekening Obyek
5	2	1	1	Honorarium PNS
5	2	1	2	Honorarium Non PNS
5	2	1	3	Uang Lembur
5	2	1	4	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5	2	1	5	Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS
5	2	1	6	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

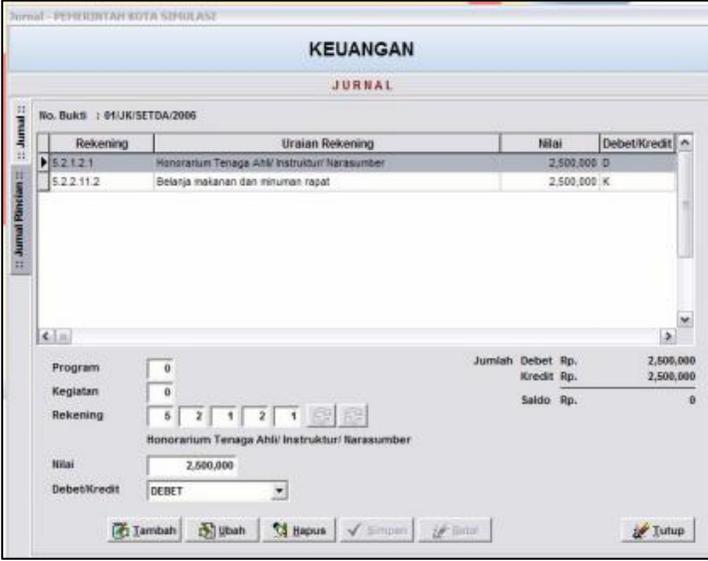
Cari Batal

**Gambar 4. 10 Kode Rekening Belanja Langsung dan Tidak Langsung**

letakkan pointer pada kode rekening yang akan dipilih klik pilih untuk memilih

atau klik  untuk membatalkan pilihan, secara otomatis halaman ini akan tertutup. Kemudian isi nilai jurnal dan pilih debit/kredit kemudian klik

 untuk menyimpan data atau klik  untuk membatalkan transaksi. Untuk ubah letakkan pointer pada record yang hendak diubah klik  kemudian ubah data yang dikehendaki, klik  untuk menyimpan perubahan atau klik  untuk membatalkan. Sedangkan untuk menghapus record letakkan pointer pada record yang akan di hapus kemudian klik tombol . Klik  untuk keluar dari halaman ini.



Rekening	Uraian Rekening	Nilai	Debet/Kredit
5.2.1.2.1	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	2,500,000	D
5.2.11.2	Belanja makanan dan minuman rapat	2,500,000	K

Program: 0  
 Kegiatan: 0  
 Rekening: 5 2 1 2 1  
 Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber  
 Nilai: 2,500,000  
 Debet/Kredit: DEBIT

Jumlah Debet Rp. 2,500,000  
 Jumlah Kredit Rp. 2,500,000  
 Saldo Rp. 0

**Gambar 4. 11 Menu Jurnal Keuangan**

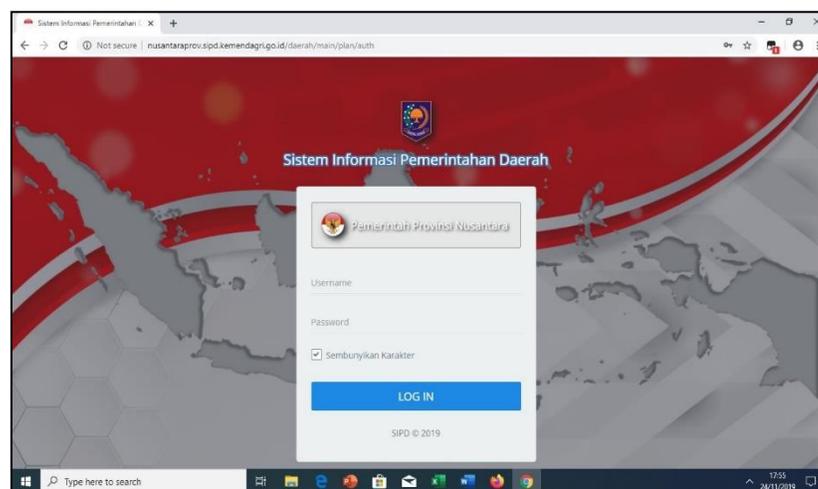
- d. Hasil inputan Jurnal dapat dicetak melalui menu Laporan – SKPD – Pembukuan.

No	TANGGAL	NOBUKTI	BUKTI	DAFTAR	DEBIT	KREDIT
1	15 Mar 2017	014.001042000	1.00.00.01.00.00.0.0.0.00.00 1.00.00.04.00.00.0.0.0.00.00	Perbaikan Tagihan PBB (Sewa/Tempat Tempat tinggal dan rumah tinggal) (Jumlah akan terdapat perubahan dalam buku ini)	2.500.000,00	2.500.000,00
<b>Jumlah</b>					2.500.000,00	2.500.000,00

**Gambar 4. 12 Menu Hasil Inputan Jurnal**

### 3.4.2 Fitur dan prosedur SIPD

1. Halaman Utama User masuk browser: MOZILLA FIREFOX, CHROME dengan alamat: - ----sipd.kemendagri.go.id----- seperti pada Gambar 4.13 dibawah:

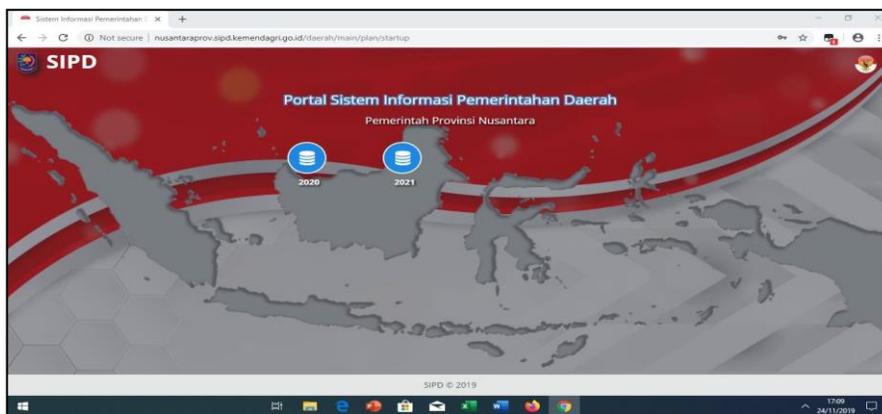


**Gambar 4. 13 Halaman Utama User SIPD**

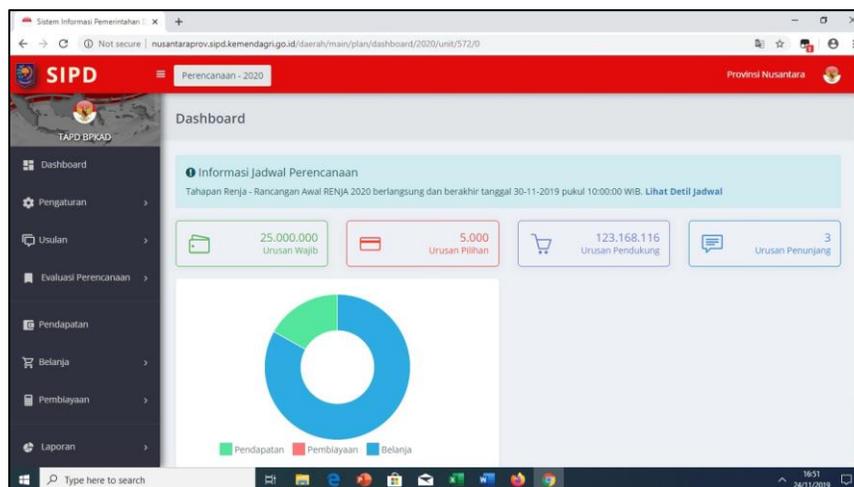
## 2. User TAPD BPKAD

User BPKAD selaku TAPD melakukan login dengan menggunakan user masing- masing, dengan password masing-masing (sesuai dengan user login yang dibuat admin daerah)

Selanjutnya setelah user melakukan login, maka akan tampak sebagaimana gambar berikut ini:



**Gambar 4. 14 Menu Tahun Rencana Pelaksanaan**



**Gambar 4. 15 Halaman Dashboard**

Setelah terlihat Gambar 4.15, selanjutnya klik menu  yang menunjukkan tahun rencana (pelaksanaan).

Sebagaimana tampak pada Gambar 4. 15 Halaman Dashboard di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

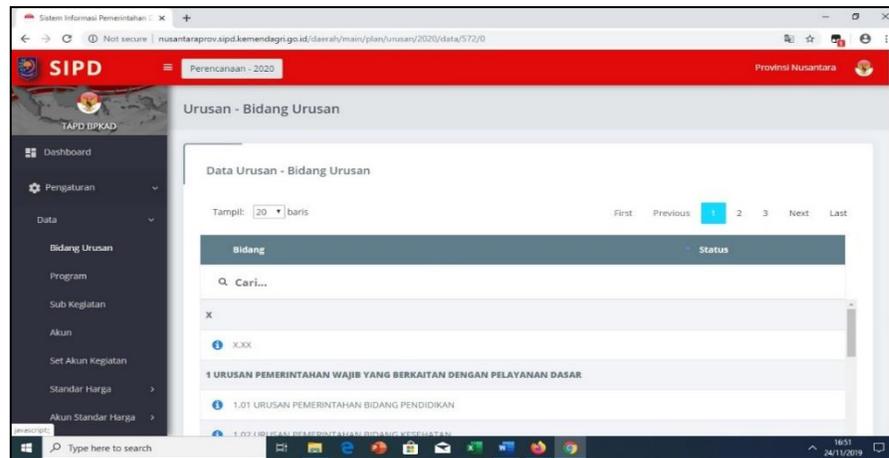
- a. Terdapat menu fase Perencanaan-2020 merupakan tahun rencana sesuai dengan tahapan jadwal. Jika TAPD BPKAD telah menyusun jadwal Penganggaran maka fasenya sesuai dengan jadwal yang dibuat.
- b. Informasi Tahapan Jadwal merupakan tahapan yang dibuat oleh TAPD Bappeda dan BPKAD
- c. Total Rekapitulasi Belanja Langsung berdasarkan Urusan Wajib, Pilihan, Pendukung dan Penunjang.
- d. Diagram jumlah Total Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Selanjutnya Pada tampilan sisi kiri halaman dashboard terdapat beberapa menu-menu diantaranya:

#### A. Menu Pengaturan

Di dalam aplikasi SIPD terdapat menu Pengaturan, adapun di dalam menu pengaturan yaitu;

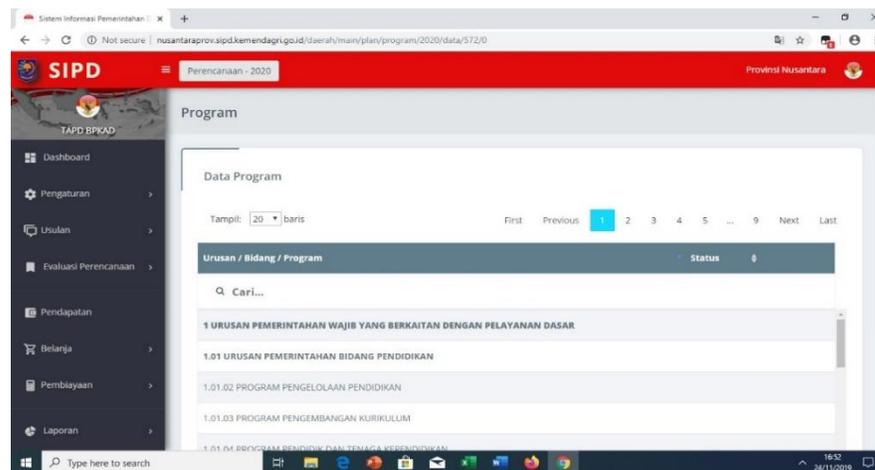
## 1. Data Bidang Urusan



**Gambar 4. 16 Data Bidang Urusan**

Pada fase perencanaan sebagaimana pada Gambar 4.17 pada user admin TAPD BPKAD dapat melihat view database Bidang Urusan.

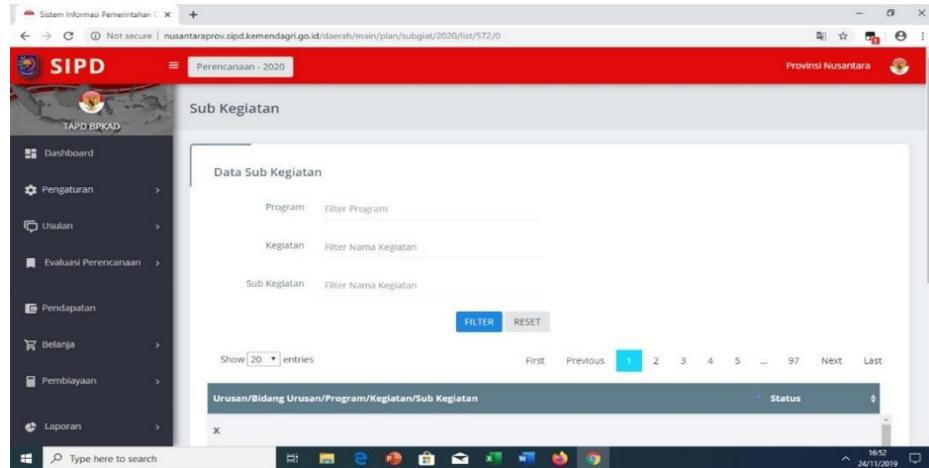
## 2. Data Program



**Gambar 4. 17 Data Program**

Pada fase perencanaan sebagaimana pada Gambar 4.17 pada user admin TAPD BPKAD dapat melihat view database Data Program

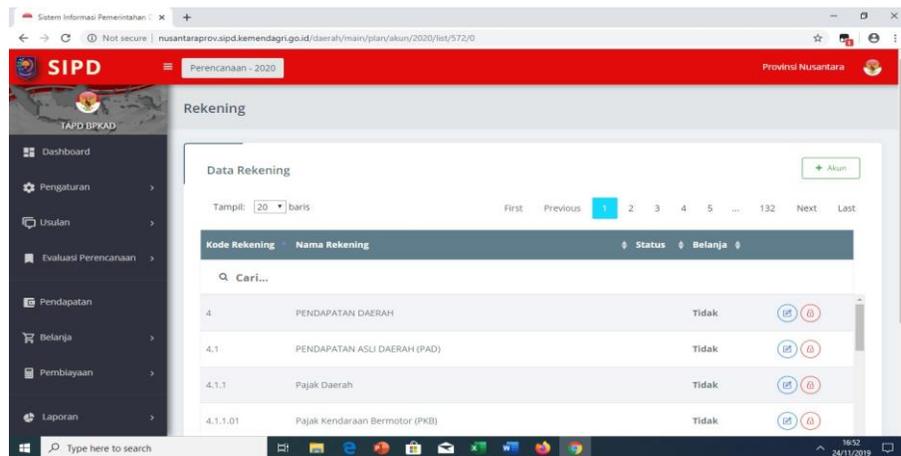
### 3. Data Sub Kegiatan



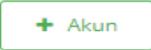
**Gambar 4. 18 Data Sub Kegiatan**

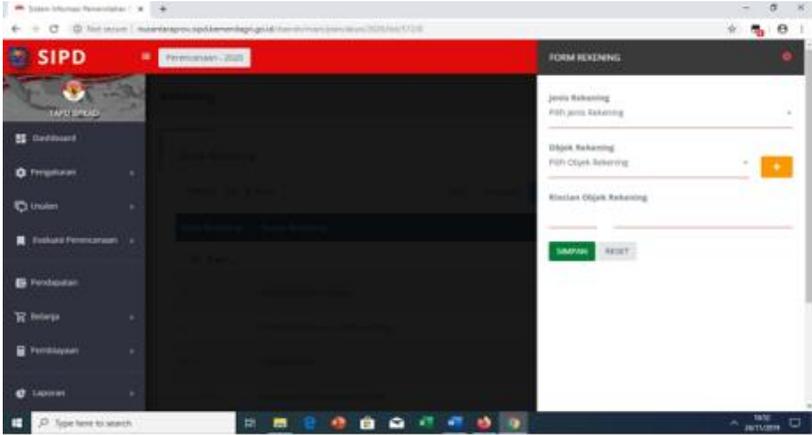
### 4. Data Rekening

TAPD BPKAD memiliki kewenangan manage akun (Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah).



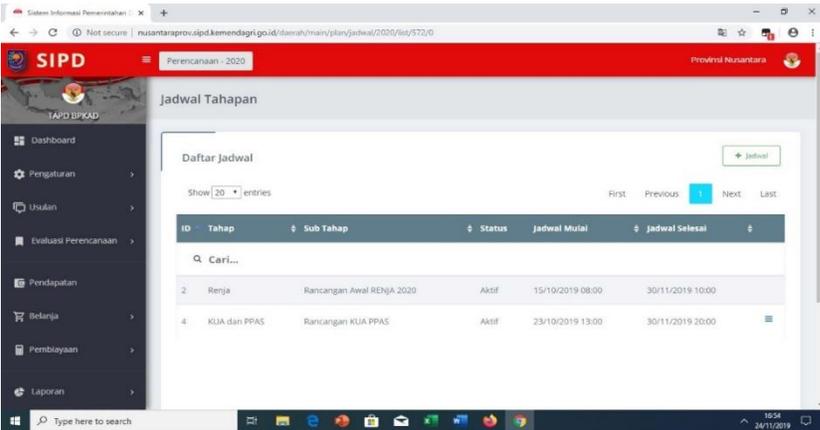
**Gambar 4. 19 Data Akun**

TAPD BPKAD memiliki kewenangan menambahkan akun sesuai dengan kebutuhan daerah melalui klik menu , maka muncul isian form rekening seperti Gambar 4.20 di bawah ini:



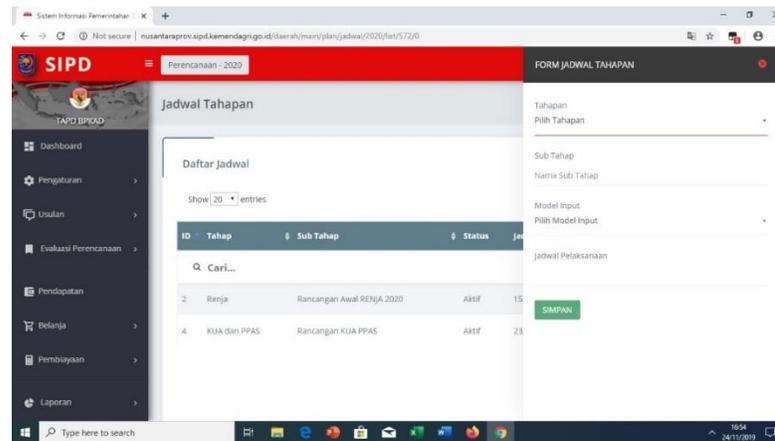
**Gambar 4. 20 Input Akun**

Pada Gambar 4.21 di bawah terdapat Form Jadwal Tahapan. User TAPD BPKAD memiliki kewenangan menyusun jadwal fase penganggaran mulai dari KUA dan PPAS sampai Penetapan APBD melalui menu .



ID	Tahap	Sub Tahap	Status	Jadwal Mulai	Jadwal Selesai
2	Renja	Rancangan Awal RENJA 2020	Aktif	15/10/2019 08:00	30/11/2019 10:00
4	KUA dan PPAS	Rancangan KUA PPAS	Aktif	23/10/2019 13:00	30/11/2019 20:00

**Gambar 4. 21 Jadwal Tahapan**



**Gambar 4. 22 Input Jadwal Tahapan**

### 3.5 Pengujian Kesesuaian

#### 3.5.1 Identifikasi pertanyaan Audit menggunakan Framework COSO

Perbandingan kesesuaian antara proses audit dalam sistem informasi yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan lima domain menurut COSO yaitu control environment, risk assessment, control activities, information and communication, dan monitoring. Proses audit sangat penting untuk diterapkan pada sistem informasi penjualan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dan meningkatkan ketetapan kesesuaian sistem. Pada penelitian ini, peneliti membandingkan antara implementasi kinerja dalam sistem informasi penjualan dengan teori berdasarkan lima domain menurut COSO yang meliputi komponen control environment (lingkungan pengendalian) risk assessment (penilaian risiko), control activities (aktivitas pengendalian), information and communication (informasi dan komunikasi), dan

monitoring (pemantauan) yang akan dipaparkan lebih rinci ke dalam Tabel 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5 berikut ini:

**Table 4. 1 Tabel Kesesuaian domain Control Environment (Lingkungan Pengendalian)**

<i>Control Environment (Lingkungan Pengendalian)</i>			
<b>Prinsip</b>	<b>Pernyataan COSO</b>	<b>Penerapan teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>Sesuai atau tidak sesuai</b>
<b><i>Demonstrate Commitment To Integrity And Ethical Values</i></b> (Menunjukkan Komitmen Terhadap Integritas dan Nilai-Nilai Etika)	Organisasi menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai integritas dan etika pada teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan?	Terdapat kebijakan dan nilai etika dalam menunjang pencapaian Instansi dalam bidang IT serta telah di tetapkannya evaluasi kerja dan tata tertib yang sesuai dengan kebijakan dalam BPKAD Sumatera Selatan.	Sesuai
<b><i>Ensure That Board Exercises Oversight Responsibility</i></b> (Memastikan Bahwa Dewan Menjalankan Tanggung Jawab Pengawasan)	Dewan/manajemen menunjukkan kemandirian manajemen dan menjalankan pengawasan terhadap pengembangan dan bekerjanya Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan yang di lakukan kepada staff nya serta selalu melakukan pengawasan terhadap perkembangan kinerja layanan TI di BPKAD Sumatera Selatan.	Sesuai
<b><i>Establish Structures, Reporting Lines, Authorities And Responsibilities</i></b> (Menetapkan Struktur, Garis Pelaporan dan Tanggung Jawab)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan dalam pengawasannya dewan menetapkan struktur, garis pelaporan, serta wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dalam pencapaian tujuan	BPKAD Sumsel belum menetapkan struktur garis pelaporan serta wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dalam mencapai tujuan	Tidak Sesuai
<b><i>Demonstrate Commitment To A Competent Workforce</i></b> (Menunjukkan Komitmen Kepada Tenaga Kerja yang Kompeten)	Instansi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten dalam keselarasan Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan	BPKAD Sumsel mempunyai proses recruitment karyawan dan proses pengembangan yang kompeten sesuai dengan kebijakan pemerintah	Sesuai

<b>Hold People Accountable</b> (Mempertahankan Pertanggungjawaban Individu)	Instansi mempertahankan individu yang kompeten dalam tanggung jawab terhadap Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan dalam mengejar tujuan?	BPKAD Sumsel dapat mempertahankan karyawan kompeten dan menantisipasi perubahan personel secara tiba-tiba serta perusahaan memiliki penilaian terhadap kinerja dan Tindakan disipliner untuk setiap karyawan.	Sesuai
--	---	---	--------

**Table 4. 2 Tabel Kesesuaian domain Risk Assessment (Penilaian Risiko)**

<i>Risk Assessment (Penilaian Risiko)</i>			
<b>Prinsip</b>	<b>Pernyataan COSO</b>	<b>Penerapan teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>Sesuai atau tidak sesuai</b>
<b>Specifies Relevant Objectives</b> (Menetapkan tujuan yang relevan)	Instansi menetapkan tujuan organisasi yang jelas untuk memungkinkan identifikasi terjadinya risiko terhadap sistem informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan	Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah memiliki kebijakan untuk mengidentifikasi terjadinya risiko dalam Sistem informasi.	Sesuai
<b>Identifies and Analyzes Risks</b> (Mengidentifikasi dan Menganalisa Resiko)	Instansi mengidentifikasi risiko yang akan terjadi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan sebagai dasar penentuan dalam pencapaian tujuan diseluruh penjurur Instansi (entitas)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum mampu mengidentifikasi risiko pada sistem informasi.	Tidak Sesuai
	Instansi menganalisa Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan sebagai dalam menentukan pengelolaan risiko diseluruh penjurur Instansi (entitas)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah telah menganalisis sistem informasi yang dilaksanakan oleh pihak IT	Sesuai
<b>Assess Fraud Risk</b> (Menilai Resiko Kecurangan)	Instansi memperhitungkan potensi kecurangan dalam menilai risiko pencapaian tujuan	Kepala BPKAD, jajaran Direksi serta pihak IT saling bekerjasama untuk menilai risiko potensi terjadinya fraud pada sistem informasi	Sesuai

		yang ada di BPKAD Sumatera Selatan.	
<b>Identifies and Analyzes Significant Change</b> (Mengidentifikasi dan Menganalisa Perubahan Signifikan)	Instansi mengidentifikasi perubahan-perubahan dalam teknologi informasi yang secara signifikan dapat mempengaruhi Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan	BPKAD Sumatera Selatan menerapkan meeting akhir tahun untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi sistem informasi pada BPKAD	Sesuai

**Table 4. 3 Tabel Kesesuaian domain Control Activity (Pengendalian Aktivitas)**

<b>Control Activity (Pengendalian Aktivitas)</b>			
<b>Prinsip</b>	<b>Pernyataan COSO</b>	<b>Penerapan teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>Sesuai atau tidak sesuai</b>
<b>Select and Develops Control Activities</b> (Memilih dan Mengembangkan Kegiatan Pengawasan)	Instansi memilih kegiatan pengendalian yang berkontribusi terhadap peringanan risiko terhadap pencapaian tujuan Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan untuk ketinggian yang dapat diterima?	BPKAD Sumsel belum menerapkan kegiatan pengendalian yang berkontribusi untuk meringankan risiko terhadap pencapaian tujuan Sistem Informasi untuk ketinggian yang dapat diterima.	Tidak Sesuai
	Instansi mengembangkan kegiatan pengendalian yang berkontribusi terhadap peringanan risiko terhadap pencapaian tujuan Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan untuk ketinggian yang dapat diterima?	Belum adanya pengembangan kegiatan pengendalian yang berkontribusi untuk peringanan risiko pada sistem informasi pada BPKAD Sumsel	Tidak sesuai
<b>Select and Develops General Controls Over Technology</b> (Memilih dan Mengembangkan Kontrol Secara Umum atas Teknologi)	Instansi memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian umum Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi?	BPKAD Sumsel telah mengembangkan kegiatan pengendalian umum atas Sistem Informasi Penjualan dengan cara menjaga hak aset user dan bertanggung jawab untuk memelihara sumber daya yang berhubungan dengan software, hardware dan network di BPKAD Sumsel	Sesuai
<b>Deploys Through Policies And Procedures</b> (Menyebarkan Melalui Kebijakan dan Prosedur)	Pengendalian Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang diharapkan	BPKAD memiliki prosedur untuk mencatat, memonitor, dan memperbaiki fasilitas layanan TI yang ada di BPKAD	Sesuai

**Table 4. 4 Tabel Kesesuaian domain Information & Communication (Informasi & Komunikasi)**

<b>Information &amp; Communication (Informasi &amp; Komunikasi)</b>			
<b>Prinsip</b>	<b>Pernyataan COSO</b>	<b>Penerapan teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>Sesuai atau tidak sesuai</b>
<b>Use relevant, quality information to support the internal control function</b> (Menggunakan Informasi yang Relevan dan Berkualitas Untuk Mendukung Fungsi Pengendalian Internal)	Instansi memperoleh dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung fungsi sistem informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan	BPKAD Sumsel memperoleh data yang relevan dari sumber internal dan eksternal yang dapat diandalkan secara tepat waktu	Sesuai
<b>Communicate Internal Control Information Internally</b> (Mengkomunikasikan informasi pengendalian internal secara internal)	Instansi mengkomunikasikan informasi secara internal terhadap sistem informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan	Belum diterapkannya pengkomunikasian informasi secara internal	Tidak Sesuai
	Instansi mengkomunikasikan tanggung jawab <i>internal control</i> yang diperlukan untuk mendukung fungsi sistem informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan	Belum adanya pengkomunikasian tanggung jawab internal control untuk mendukung fungsi sistem informasi pada BPKAD Sumsel	Tidak Sesuai
<b>Communicate Internal Control Information Externally</b> (Mengkomunikasikan informasi pengendalian internal secara eksternal)	instansi mengkomunikasikan secara eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi sistem informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan	BPKAD Sumsel memiliki metode yang tepat untuk berkomunikasi kepada pihak eksternal.	Sesuai

**Table 4. 5 Tabel Kesesuaian domain Monitoring (Pemantauan)**

<b>Monitoring (Pemantauan)</b>			
<b>Prinsip</b>	<b>Pernyataan COSO</b>	<b>Penerapan teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>Sesuai atau tidak sesuai</b>
<b>Conduct Ongoing And/Or Separate Evaluations</b> (Melakukan Evaluasi Berkelanjutan dan/atau Terpisah)	Instansi memilih, mengembangkan dan melakukan evaluasi yang sedang berlangsung atau terpisah untuk memastikan apakah komponen Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan dapat berfungsi	BPKAD Sumsel melakukan evaluasi terhadap layanan TI serta mencatat kejadian yang terjadi terhadap keamanan yang ada di instansi	Sesuai
	Instansi mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan Sistem Informasi pada Badan	BPKAD Sumsel memiliki jadwal yang tepat terkait dalam pengevaluasian dan	Sesuai

<p><b>Evaluates and Communicates Deficiencies</b> (Mengevaluasi, dan Mengkomunikasikan Kekurangan)</p>	<p>Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen senior dan dewan</p>	<p>pengkomunikasian kekurangan sistem informasi yang ada di BPKAD Sumsel.</p>	
--	---	---	--

### 3.6 Pengujian Kebenaran antara penerapan teknologi informasi yang ada di BPKAD sumsel dengan Framework COSO

#### 3.6.1 Deskripsi kebenaran teknologi informasi dengan framework COSO pada domain control environment (lingkungan pengendalian)

Berdasarkan Tabel 4.1 tentang hasil analisis kesesuaian penerapan Sistem Informasi Human Resources Portal Kompas Gramedia Group pada Tribun Sumsel dengan teori COSO pada domain control environment belum sepenuhnya sesuai dengan pengauditan yang ada di BPKAD Sumsel.

##### 1. *Demonstrate Commitment To Integrity And Ethical Values*

Berdasarkan hasil wawancara audit dengan pihak IT BPKAD telah sesuai dengan *framework coso*, terdapat kebijakan dan nilai etika dalam menunjang pencapaian Instansi dalam bidang IT serta telah di tetapkannya evaluasi kerja dan tata tertib yang sesuai dengan kebijakan dalam BPKAD Sumatera Selatan. (Komitmen Terhadap Integritas dan Nilai-Nilai Etika).

##### 2. *Ensure That Board Exercises Oversight Responsibility*

Berdasarkan hasil wawancara audit dengan pihak IT BPKAD telah sesuai dengan *framework coso* Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan yang di lakukan kepada staff

nya serta selalu melakukan pengawasan terhadap perkembangan kinerja layanan TI di BPKAD Sumatera Selatan.

3. ***Establish Structures, Reporting Lines, Authorities And Responsibilities***

(Berdasarkan hasil wawancara audit dengan pihak IT BPKAD tidak sesuai dengan *framework coso* BPKAD Sumsel belum menetapkan struktur garis pelaporan serta wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dalam mencapai tujuan

4. ***Demonstrate Commitment To A Competent Workforce***

Berdasarkan hasil wawancara audit dengan pihak IT BPKAD telah sesuai dengan *framework coso* BPKAD Sumsel mempunyai proses recruitment karyawan dan proses pengembangan yang kompeten sesuai dengan kebijakan perusahaan.

5. ***Hold People Accountable***

Berdasarkan hasil wawancara audit dengan pihak IT BPKAD telah sesuai dengan *framework coso* BPKAD Sumsel dapat mempertahankan karyawan kompeten dan menantisipasi perubahan personel secara tiba-tiba serta perusahaan memiliki penilaian terhadap kinerja dan Tindakan disipliner untuk setiap karyawan

**3.6.2 Deskripsi kebenaran teknologi informasi dengan framework COSO pada domain risk assessment (penilaian risiko)**

1. ***Specifies Relevant Objectives*** (Menetapkan tujuan yang relevan)

Berdasarkan hasil wawancara audit dengan pihak IT BPKAD telah sesuai dengan *framework coso*, Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah

memiliki kebijakan untuk mengidentifikasi terjadinya risiko dalam Sistem informasi.

2. ***Identifies and Analyzes Risks*** (Mengidentifikasi dan Menganalisa Resiko)

Berdasarkan hasil wawancara audit dengan pihak IT BPKAD belum sesuai dengan *framework coso* Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum mampu mengidentifikasi risiko pada sistem informasi. Dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah telah menganalisis sistem informasi yang dilaksanakan oleh pihak IT

3. ***Assess Fraud Risk*** (Menilai Resiko Kecurangan)

Berdasarkan hasil wawancara audit dengan pihak IT BPKAD sesuai dengan *framework coso* Kepala BPKAD, jajaran Direksi serta pihak IT saling bekerjasama untuk menilai risiko potensi terjadinya fraud pada sistem informasi yang ada di BPKAD Sumatera Selatan.

4. ***Identifies and Analyzes Significant Change*** (Mengidentifikasi dan Menganalisa Perubahan Signifikan)

Berdasarkan hasil wawancara audit dengan pihak IT BPKAD telah sesuai dengan *framework coso*, BPKAD Sumatera Selatan menerapkan meeting akhir tahun untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi sistem informasi pada BPKAD

**3.6.3 Deskripsi kebenaran teknologi informasi dengan framework COSO pada domain control activity (pengendalian aktivitas)**

1. ***Select and develops control activities*** (memilih dan mengembangkan kegiatan pengawasan)

Berdasarkan hasil wawancara audit dengan pihak IT BPKAD belum sesuai dengan *framework coso* BPKAD Sumsel belum menerapkan kegiatan pengendalian yang berkontribusi untuk meringankan risiko terhadap pencapaian tujuan Sistem Informasi untuk ketinggian yang dapat diterima dan Belum adanya pengembangan kegiatan pengendalian yang berkontribusi untuk peringanan risiko pada sistem informasi pada BPKAD Sumsel

2. ***Select and develops general control over technology*** (memilih dan mengembangkan control secara umum atas teknologi)

Berdasarkan hasil wawancara audit dengan pihak IT BPKAD telah sesuai dengan *framework coso* BPKAD Sumsel telah mengembangkan kegiatan pengendalian umum atas Sistem Informasi Penjualan dengan cara menjaga hak aset user dan bertanggung jawab untuk memelihara sumber daya yang berhubungan dengan software, hardware dan network di BPKAD Sumsel

3. ***Deploys through policies and procedures*** (menyebarkan melalui kebijakan dan prosedur)

Berdasarkan hasil wawancara audit dengan pihak IT BPKAD telah sesuai dengan *framework coso* BPKAD memiliki prosedur untuk mencatat, memonitor, dan memperbaiki fasilitas layanan TI yang ada di BPKAD

### 3.6.4 Deskripsi kebenaran teknologi informasi dengan framework COSO pada domain information and communication (informasi dan komunikasi)

#### 1. Use relevant, quality information to support the internal control function

(menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung fungsi pengendalian internal)

Berdasarkan hasil wawancara audit dengan pihak IT BPKAD telah sesuai dengan *framework coso* BPKAD Sumsel memperoleh data yang relevan dari sumber internal dan eksternal yang dapat diandalkan secara tepat waktu dan Belum adanya pengkomunikasian tanggung jawab internal control untuk mendukung fungsi sistem informasi pada BPKAD Sumsel

#### 2. Communicate internal control information internally (mengkomunikasikan informasi pengendalian internal secara internal)

Berdasarkan hasil wawancara audit dengan pihak IT BPKAD belum sesuai dengan *framework coso* Belum diterapkannya pengkomunikasian informasi secara internal

#### 3. Communicate internal control information externally (mengkomunikasikan informasi pengendalian internal secara eksternal)

Berdasarkan hasil wawancara audit dengan pihak IT BPKAD sudah sesuai dengan *framework coso* BPKAD Sumsel memiliki metode yang tepat untuk berkomunikasi kepada pihak eksternal.

### **3.6.5 Deskripsi kebenaran teknologi informasi dengan framework COSO pada domain monitoring (Pemantauan)**

1. *Conduct ongoing and/or separate evaluation* (melakukan evaluasi berkelanjutan dan atau terpisah)

Berdasarkan hasil wawancara audit dengan pihak IT BPKAD telah sesuai dengan *framework coso*, BPKAD Sumsel melakukan evaluasi terhadap layanan TI serta mencatat kejadian yang terjadi terhadap keamanan yang ada di instansi

2. *Evaluates and communicates deficiencies* (mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan)

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak IT BPKAD telah sesuai dengan *framework coso*, BPKAD Sumsel memiliki jadwal yang tepat terkait dalam pengevaluasian dan pengkomunikasian kekurangan sistem informasi yang ada di BPKAD Sumsel.

### **3.7 Pelaporan Hasil audit**

Hasil audit yang di lakukan pada teknologi informasi dari domain yang ada dalam Framework COSO terdapat beberapa temuan yaitu masih adanya ketidak sesuaian antara pengimplementasian sistem informasi yang ada di BPKAD Sumsel dengan *framework COSO*. Pada domain control environment, risk assessment, control activities serta information and communication terdapat atribut yang belum sesuai dengan pengimplementasian *COSO*. Artinya pengimplementasian sistem informasi yang ada di BPKAD Sumsel masih belum optimal sehingga diusulkan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja sistem informasi pada BPKAD SUMSEL.

### 3.7.1 Rekomendasi

Berdasarkan wawancara dan pertanyaan dari coso, maka ada beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk meningkatkan layanan teknologi informasi pada BPKAD Sumsel. Adapun rekomendasi yang diberikan untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan dapat dilihat pada Tabel berikut, yaitu:

**Table 4. 6 Rekomendasi Hasil Audit**

No.	Domain	Masalah yang terjadi	Rekomendasi
1	<i>Control Environment</i>	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah mengimplementasikan kebijakan perusahaan dan nilai-nilai etika, namun belum dikelola dan dikontrol dengan baik	Melakukan pengontrolan secara berkala tentang kebijakan yang dibuat, apakah harus ada yang diperbaharui atau tidak dan mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam perusahaan agar tercipta kerjasama yang baik untuk menunjang kegiatan perusahaan.
		Dalam melakukan pengawasan, direktur perusahaan belum melakukan secara tepat waktu dan terjadwal serta tidak ada catatan terhadap pengawasan tersebut.	Membuat jadwal kegiatan pengawasan pada setiap bagian IT BPKAD Sumsel, setiap pengawasan harus dilakukan dengan konsisten dan memiliki dokumentasi agar bisa membandingkan atau memperbaiki layanan teknologi informasi.
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki prosedur tentang proses <i>recruitment</i> karyawan yang kompeten. Namun, belum dilakukan dengan konsisten berdasarkan kebijakan perusahaan yang telah dibuat.	Melakukan peninjauan secara berkala dan evaluasi terhadap kebijakan perusahaan tentang proses <i>recruitment</i> karyawan yang kompeten. Prosedur ini harus dicek dengan teliti agar tidak sia-sia dalam memilih karyawan nantinya.
2	<i>Risk Assessment</i>	Penilaian risiko terkait layanan TI perusahaan belum dilakukan dengan maksimal dan terdefinisi dengan baik.	Meninjau dan mengevaluasi apa saja faktor yang menyebabkan penilaian risiko belum dilakukan dengan baik. Membuat laporan penilaian risiko yang terjadi, dengan adanya laporan tersebut semakin mudah untuk mengetahui risiko-risiko yang dapat mengganggu jalannya kinerja perusahaan
		Belum adanya review secara rutin yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko layanan TI perusahaan.	Membuat jadwal untuk melakukan review secara rutin dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko layanan TI, serta membuat dokumentasi layanan TI perusahaan yang dapat menjadi risiko/perubahan pada proses permasalahan tersebut
3		Pihak IT dalam meninjau permasalahan belum melakukan perbaikan berkelanjutan dan inovasi untuk mengembangkan kegiatan perusahaan.	Pihak IT dapat membuat <i>continue plan</i> untuk mengembangkan inovasi atau ide yang didapatkan dari karyawan. Mengontrol dan melakukan perbaikan berkelanjutan tentang masalah layanan TI
		Belum adanya jadwal rutin untuk mengecek siapa saja yang menggunakan hak akses pada layanan TI perusahaan	Membuat daftar jadwal untuk mengecek penggunaan hak akses layanan TI secara berkala. Mengevaluasi dan membuat laporan

			siapa saja yang menggunakan hak akses pada layanan TI perusahaan.
	<i>Control Activities</i>	Belum ada dokumentasi untuk memonitoring staf yang melakukan backup data.	Membuat dokumentasi untuk memonitoring staf yang melakukan backup data pada layanan TI perusahaan. Back up data dilakukan secara berkala (misalnya satu bulan sekali) dan setiap staf diwajibkan mengisi dokumentasi monitoring back up data
		Belum menyusun dan mem-backup data yang penting sesuai jadwal.	Membuat rencana dan menyusun back up data penting yang digunakan oleh perusahaan. Back up data harus dilakukan sesuai jadwal dan konsisten agar dokumen atau file penting tidak hilang dan dapat disimpan dengan aman.
4	<i>Information &amp; Communication</i>	Pihak IT sudah memiliki prosedur form layanan permasalahan namun, belum ada evaluasi yang terjadwal dan penanganan yang cepat pada proses ini.	Setelah mengisi form layanan permasalahan, pihak IT harus melakukan tindak lanjut untuk menangani permasalahan yang terjadi. Melakukan evaluasi atau perbaikan tentang layanan permasalahan dari insiden 73 yang terjadi dalam perusahaan.
		Kesadaran menjaga informasi dan data yang bersifat private dan confidential.	Menyaring informasi dan data yang masuk/keluar pada perusahaan agar tidak merugikan pihak perusahaan. Memberikan teguran atau sanksi bagi karyawan yang tidak menjaga informasi yang bersifat private dan confidential.
		Pemahaman tentang membatasi pihak-pihak yang tidak terkait dengan tugas atau permasalahan yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal.	Membuat standar pengawasan tentang batasan pihak-pihak yang tidak terkait dengan tugas atau permasalahan yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal.
5	<i>Monitoring</i>	Tidak memiliki dokumentasi atau form penyelesaian masalah yang sudah diselesaikan.	Membuat dokumentasi atau form penyelesaian masalah yang terjadi di bagian IT yang sudah diselesaikan sesuai prosedur
		Belum dilakukan perbaikan yang berkelanjutan secara teratur untuk meminimalisir terjadinya insiden lain atau insiden yang akan datang.	Membuat dokumentasi atau rencana ke depan tentang permasalahan yang terjadi dan mengevaluasi setiap perbaikan untuk meminimalisir terjadinya insiden yang akan datang.
		Sulit mendapatkan bantuan teknis.	Melakukan kerjasama atau membuat pelatihan staf khusus yang dibentuk untuk membantu pihak perusahaan. Mengevaluasi bantuan teknis yang di dapat untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis dan evaluasi IT Governance terhadap Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menggunakan framework COSO, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada penelitian ini telah dilakukan audit teknologi informasi menggunakan framework COSO, dalam melakukan audit terdapat beberapa tahapan-tahapan audit yakni, tahap pemeriksaan pendahuluan, tahap pemeriksaan terperinci, tahap pengujian kesesuaian pengujian kebenaran dan tahap penilaian umum atas hasil pengujian.
2. Karena audit TI harus dapat memastikan bahwa mekanisme Sistem Informasi yang berjalan tetap berada di koridor integritas
3. Untuk dapat mencegah atau mendeteksi kemungkinan fraud atau kecurangan keuangan dan asset yg ada di BPKAD yang berpotensi merugikan Negara
4. Dengan menggunakan Framework COSO dalam mencari tau kesesuaian audit yang telah di teliti terdapat beberapa yg sesuai dan tidak sesuai, adapapun yang sesuai terdapat di komponen COSO monitoring, sedangkan di control environment, risk assessment, control activity, information and communication, ada yang sesuai dengan tidak juga.

5. Hasil audit yang dilakukan pada teknologi informasi dari domain yang ada dalam Framework COSO terdapat beberapa temuan yaitu masih adanya ketidaksesuaian antara pengimplementasian sistem informasi yang ada di BPKAD Sumsel dengan framework COSO. Pada domain control environment, risk assessment, control activities serta information and communication terdapat atribut yang belum sesuai dengan pengimplementasian COSO. Artinya pengimplementasian sistem informasi yang ada di BPKAD Sumsel masih belum optimal sehingga diusulkan rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan kinerja sistem informasi pada BPKAD SUMSEL.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian terdapat beberapa saran, yaitu

1. Hendaknya audit sistem informasi dapat dikembangkan dan mengacu pada framework audit sistem informasi yang lain agar dapat menjadi bahan pembandingan sehingga kinerja dari sistem informasi BPKAD Sumsel akan lebih baik.
2. Penelitian Audit yang telah dilakukan untuk selanjutnya dapat dikembangkan pada Sistem Informasi yang ada di BPKAD Sumsel yang sudah bisa menggunakan aplikasi atau melalui website, agar mudah di akses.
3. Karena Sistem informasi SIMDA masih melakukan penginstalan per PC, hendaknya SIMDA dibuat menjadi aplikasi atau website, agar pegawai/staff TI dari BPKAD dapat mudah memantau instansi-instansi lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A. A. (2012). Auditing and assurance services: an integrated approach.
- Agoes, S. (2012). Auditing: Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh akuntan publik.
- Abdullah, R., Ismail, Z., & Smith, M. (2018). Audit committees' involvement and the effects of quality in the internal audit function on corporate governance. *International Journal of Auditing*, 22(3), 385-403.
- Bawono, I. R., & Restianto, Y. E. (2020). Pengaruh opini audit, sistem pengendalian intern pemerintah dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kasus korupsi di daerah. *Akuntansi Dewantara*, 4(2), 113-127.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. COSO, (2013), *Internal Control—Integrated Framework*. Committee of internal Control.
- Da Veiga, A. (2015). The Influence of Information Security Policies on Information Security Culture: Illustrated through a Case Study. In HAISA (pp. 22-33).
- Gondodiyoto, S., & Hendarti, H. (2007). *Audit sistem informasi lanjutan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Gramling, A. A., & Ramamoorti, S. (2003). Research opportunities in internal auditing. Institute of Internal Auditors.
- Janvrin, D. J., Payne, E. A., Byrnes, P., Schneider, G. P., & Curtis, M. B. (2012). The updated COSO Internal Control—Integrated Framework: Recommendations and opportunities for future research. *Journal of Information Systems*, 26(2), 189-213.
- Singleton, A. J., & Waltzman, S. B. (2015). Audiometric evaluation of children with hearing loss. *Otolaryngologic Clinics of North America*, 48(6), 891-901.

Ulina, R., Mulyadi, R., & Tjahjono, M. E. S. (2018). Pengaruh Kualitas Audit Dan Komite Audit Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia. *Tirtayasa Ekonomika*, 13(1), 1-26.

Suharsaputra, U. (2012). Metode penelitian: kuantitatif, kualitatif, dan tindakan.

Wand, Y., & Weber, R. (1993). On the ontological expressiveness of information systems analysis and design grammars. *Information systems journal*, 3(4), 217-237.

## LAMPIRAN

### 1. SK Pembimbing



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG  
NOMOR : 049 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI SERATA SATU ( S I )  
BAGI MAHASISWA TINGKAT AKHIR FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**

---

**DEKAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH PALEMBANG**

**Meningkat :**

1. Bahwa untuk mendukung Program serjana (S1) bagi Mahasiswa, maka perlu ditunjuk Tenaga ahli sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua yang bertanggung jawab dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa untuk lancarnya tugas pokok itu, maka perlu ditetapkannya Surat Keputusan Dekan (SKD) tersendiri. Decan yang ditunjuk dan tercantum dalam SKD ini mematuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 53 Tahun 2005 tentang Organisasi dan tata kerja Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 154/2004 tentang Rencana lima pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama No.82 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang;
10. Peraturan Menteri Agama No.33 tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keragaman;
11. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Nomor 60/98 Tahun 2004 tentang Standar Biaya Honorarium dibingkungan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2013;
12. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2014 tentang Arah Statua IAIN menjadi Universitas Islam Negeri;
13. RMA nomor 08 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024;
14. Keputusan Dirjen Pendidikan nomor 4475 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Dirjen Pendidikan tahun 2020-2024;
15. Kontrol Kinerja Rektor UIN Raden Fatah tahun 2020 nomor : PRU\_124/PB/2020 tentang Kontrol Kinerja, Kualitas Lulusan; Kapasitas Mahasiswa; Penyelesaian Studi Tepat Waktu;
16. SK Dekan Fakultas Sains dan Teknologi no. 82 Tahun 2017;
17. DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2021;

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

Pertama : Menunjuk ahli	: 1. <b>Rusnala Sati, M.Kom</b>	NIP : 197911252004032000
	: 2. <b>Muhammad Son Muhtar, M.Kom</b>	NIDN : 2929128393

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua Skripsi Mahasiswa :

Nama	: <b>PUTRI FINISHITA</b>
NIDN/Dirutan	: 1720800003/ Sistem Informatika
Sesuai/Tahun	: Genap/ 2021-2022
Judul Skripsi	: <b>Audit Teknologi Informasi Pada BPKAD Sumatera Selatan Menggunakan Framework Core</b>

**Kedua :** Kepada Pembimbing Utama dan Pembimbing Kedua tersebut diberi hak sepenuhnya untuk menerima judul kerangka dengan persetujuan fakultas.

**Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku satu tahun sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat ketidaklaksanaan dalam pelaksanaan ini.

**DITETAPKAN DI : PALEMBANG  
PADA TANGGAL : 21 - 04 - 2022**



**JEMBUKAN :**

1. Dekan UIN Raden Fatah Palembang
2. Ketua Prodi Sistem Informatika Fakultas Sains dan Teknologi UIN - RF Palembang ;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran 1. 1 SK Pembimbing

## 2. Surat Izin Penelitian

	<b>PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN</b> <b>BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH</b> Jalan Kapten A. Rivai Nomor 51 Palembang, Provinsi Sumatera Selatan Telp. (0711) 5736539, Fax. (0711) 5736539 Palembang 30127	
	Palembang, 05 Mei 2021	
Nomor : 421.4/01964/BPKAD-I/2021 Sifat : Biasa Lampiran : - Hal : Permohonan Izin Pengambilan Data	Kepada Yth. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri (UIN) di - Palembang	
<p>Menjawab surat Saudara Nomor : B-359/Un.09/PP.07/III.2/04/2021 Tanggal 06 April 2021 perihal izin mengadakan penelitian, disampaikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui dan mengizinkan mahasiswa Universitas Islam Negeri an. Putri Finishita, NIM 1730803060 untuk melakukan penelitian dan pengambilan data dalam rangka menyelesaikan skripsi, dengan catatan data-data tersebut tidak dipublikasikan untuk umum hanya untuk kepentingan dunia pendidikan dan apabila dipublikasikan untuk umum akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.</p>		
		 <b>H. AKHMAD MUKHLIS, SE, MSI</b> Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 196406211993031004
Tembusan : Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (sebagai laporan)		

Lampiran 1. 2 Surat Izin Penelitian

## 3. Form Bimbingan Skripsi


**Fakultas Sains dan Teknologi**  
**UIN Raden Fatah**  
<http://sainstek.radenfatah.ac.id/>

### FORM BIMBINGAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Putri Finishita  
 Program Studi : Sistem Informasi  
 Nim : 1730803060  
 Judul Skripsi/TA : Audit Teknologi  
 Informasi pada BPKAD Sumatera Selatan menggunakan Framework COSO

Dosen Pembimbing I :  
**Rusnala Santi, M.Kom**  
 Nip. 197911252014032002

NO	HARI/TGL	PEMBAHASAN	STATUS OK/REFISI	PARAF
1	Senin / 26/3/2022	Bab I : Penulisan referensi dll. Lihat pedoman skripsi isi sub bab I A revisi	Revisi	
2	Jumat / 22/4/2022	Bab I : Latar belakang, dll. Bab II : teori yg dibahas Bab III : metode penelitian, telaah pustaka	Revisi	
3	Senin / 24/8/2022	Bab I : Pendahuluan (Latar belakang) Bab II : penulisan Bab III : telaah penelitian.	Revisi	
4	Senin / 12/9/2022	Bab I : teori peneliti Bab II : Acc Bab III : Metode peneliti telaah pustaka	Revisi	
5	Senin / 5/11/2022	Bab II : ACC Bab III : Acc	Lanjutan	
6	Kamis / 15/12/2022	Interviu Asesorane Audit + framework COSO		



Fakultas Sains dan Teknologi  
UIN Raden Fatah  
<http://sainstek.radenfatah.ac.id/>

### FORM BIMBINGAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Nama Mahasiswa : Putri Finishita  
Program Studi : Sistem Informasi  
Nim : 1730003060  
Judul Skripsi/TA : Audit Teknologi  
Informasi pada BPKAD Sumatera Selatan menggunakan  
Framework COSO

Dosen Pembimbing II :  
**Muhammad Son Muarje, M.Kom.**  
NIDN. 2029128503

NO	HARI/TGL	PEMBAHASAN	STATUS OK/REFISI	PARAF
1	22/04 /04	judul tetap sama : - frugal pelajari prameworke caco - Observasi lagi ke BPKAD	OK	
2	25/04 /04	- Cba lagi sistem SIMPAMJA. - evaluasi yang bagaimana.	OK	
3	04/10 /10	- BAB I - BAB II - BAB III	Acc	
4	13/10 /10	Bimbingan Pertanyaan BAB IV	OK	
5	12/12 /12	- Tambahkan deskripsi pada tiap conber.	Acc/babiv publikasi	
6	14/12 /12	Acc bab IV & bab V / Acc kegiatan SEMHIS	OK	

Lampiran 1. 4 Form Bimbingan 2

#### 4. Berita Acara Wawancara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
Jln. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang 30126  
Telp: (0711) 353360 Website: www.radenfatah.ac.id

---

**BERITA ACARA**

Pada tanggal 11 Oktober 2022 telah dilaksanakan kegiatan pengambilan data yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan untuk memenuhi tugas akhir strata satu (S1).

Tempat : BPKAD PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Narasumber : Alen Agustin - SE.M.Si  
Bagian : Kasubag

Pihak peneliti melakukan pengajuan pertanyaan dengan pihak narasumber berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian narasumber memberikan jawaban terkait pertanyaan yang ada dibawah. Adapun pertanyaan terlampir sebagai berikut.

Palembang, 11 Oktober 2022

Peneliti,  
  
Putri Finishita

Narasumber,  
  
( Alen Agustin, SE.M.Si )

Lampiran;  
-Pertanyaan dengan basis  
framework COSO

Lampiran 1. 5 Berita Acara Wawancara

## 5. Lampiran Wawancara



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
Jln. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang 30126  
Telp: (0711) 353360 Website: www.radenfatah.ac.id

### Lampiran Wawancara

**Pewawancara:** Apa saja aplikasi yang ada di BPKAD?

**Narasumber :** Ada SIMDA (system informasi manajemen daerah) dan SIPD (system informasi pengelolaan daerah)

**Pewawancara:** Siapa saja pengguna system informasi yang ada di BPKAD?

**Narasumber :** Semua staff dan seluruh ASN di dinas lain menggunakan SIMDA dan SIPD

**Pewawancara:** Di dalam aplikasi simda ada apa saja fiturnya?

**Narasumber :** Di dalam simda keuangan ada:

1. Proses pengelolaan keuangan
2. SPP (Surat Perintah Pembayaran)
3. SPM (Surat Perintah Membayar)
4. SP2D (Surat Pencairan Daerah)

**Pewawancara:** Kalau di dalam aplikasi SIPD ada fitur apa saja?

**Narasumber :** Kalau di dalam SIPD ada fitur

1. Proses Pengelolaan Perencanaan Daerah
2. Proses pengelolaan Anggaran Daerah

### 3. Proses Pengelolaan Keuangan Daerah

**Pewawancara:** Apakah ada kekurangan dari aplikasi tersebut?

**Narasumber :** Kalau dari SIPD kekurangannya yaitu

1. Karna aplikasi SIPD milik dari pemerintah pusat jadi Ketika ada masalah ada bug ataupun error, kita harus melapor ke KEMENDAGRI, trus terkait permasalahan itu belum tentu langsung cepet di respon dari pihak sana, respon dari sana bisa jadi sekitar satu minggu ataupun lebih,
2. Terus terkendala di *source code*, kita tidak bisa memodifikasi, karna aplikasi tersebut dari pusat.

**Pewawancara:** Kalau dari segi jaringan apakah bagus atau tidak?

**Narasumber :** Kalau dari internetnya bagus, cuman dari SIPD agak lemot saat mengakses SIPD.

**Pewawancara:** Pihak IT di BPKAD ada berapa orang?

**Narasumber :** Ada 4 orang

**Pewawancara:** Apakah ada kendala bagi staff IT di BPKAD?

**Narasumber :** Kalau kendala sih nggak ada ya, tapi kami disini juga membantu dinas lain dalam pengentryan data, turun langsung kelapangan, team IT di BPKAD membantu seluruh OPD dari dinas lain.

## 6. Lembar Kerja Assesment

### LEMBAR KERJA ASSEMENT AUDIT KEAMANAN SISTEM INFORMASI PADA BPKAD SUMSEL

Auditor :

Auditee :

Tanggal :

Area :

Focus auditee :

<i>Control Environment (Lingkungan Pengendalian)</i>				
No	Prinsip	pertanyaan	Sesuai/Tidak Sesuai	Implementasi di BPKAD
1.	<b>Demonstrate Commitment To Integrity And Ethical Values</b> (Menunjukkan Komitmen Terhadap Integritas dan Nilai-Nilai Etika)			
2.	<b>Ensure That Board Exercises Oversight Responsibility</b> (Memastikan Bahwa Dewan Menjalankan Tanggung Jawab Pengawasan)			
3.	<b>Establish Structures, Reporting Lines, Authorities And Responsibilities</b>			

	(Menetapkan Struktur, Garis Pelaporan dan Tanggung Jawab)			
4.	<b>Demonstrate Commitment To A Competent Workforce</b> (Menunjukkan Komitmen Kepada Tenaga Kerja yang Kompeten)			
5.	<b>Hold People Accountable</b> (Mempertahankan Pertanggungjawaban Individu)			
<i>Risk Assessment (Penilaian Resiko)</i>				
6.	<b>Specify Relevant Objectives</b> (Menetapkan tujuan yang relevan)			
7.	<b>Identify and Analyze Risks</b> (Mengidentifikasi dan Menganalisa Resiko)			
8.	<b>Assess Fraud Risk</b> (Menilai Resiko Kecurangan)			
9.	<b>Identify and Analyze Significant Change</b> (Mengidentifikasi dan Menganalisa Perubahan Signifikan)			
<i>Control Activity (Pengendalian Aktivitas)</i>				
10.	<b>Select and Develops Control Activities</b> (Memilih dan Mengembangkan Kegiatan Pengawasan)			

## 7. Laporan Audit

Lampiran 1. 8 Laporan Audit

**LAPORAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI PADA BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)  
SUMATERA SELATAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK  
COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATION OF THE  
TREADWAY COMMISSION (COSO)**

**Disusun Oleh:**

**PUTRI FINISHITA  
NIM. 1730803060**



**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI  
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2022**

## EXECUTIVE SUMMARY

Berdasarkan penelitian audit Teknologi Informasi yang telah dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, disimpulkan bahwa teknologi informasi yang berjalan saat ini belum sesuai dengan standar framework COSO. Hal ini dikarenakan dari 5 komponen dan 17 prinsip, semuanya masih ditemukan implementasi yang belum sesuai kecuali di komponen ke 5 yaitu monitoring. sehingga menghasilkan rekomendasi untuk beberapa control pada masing-masing komponen, sebagai bahan evaluasi untuk organisasi untuk memperbaiki teknologi informasi yang belum berjalan optimal.

Karena Sistem informasi SIMDA masih melakukan penginstalan per PC, hendaknya SIMDA dibuat menjadi aplikasi atau website, agar pegawai/staff TI dari BPKAD dapat mudah memantau instansi-instansi lain. Dan hendaknya Penelitian Audit yang telah dilakukan untuk selanjutnya dapat dikembangkan pada Sistem Informasi yang ada di BPKAD Sumsel yang sudah bisa menggunakan aplikasi atau melalui website, agar mudah dalam pengaksesannya.

# LEMBAR PENGESAHAN

## LAPORAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI PADA BPKAD SUMATERA SELATAN MENGGUNAKAN FRAMEWORK COSO

OLEH:

Putri Finishita

1730803060

### LAPORAN AUDIT

Disetujui Oleh

Penanggung Jawab Kegiatan Audit

Auditor



Aken Agustin, SE, M.Si

Kasubag IT BPKAD SUMSEL



Putri Finishita

NIM. 1730803060

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LAPORAN AUDIT .....</b>	<b>81</b>
<b>EXECUTIVE SUMMARY.....</b>	<b>82</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>83</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>84</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>85</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>86</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>87</b>
1.1 Latar Belakang.....	87
1.2 Tujuan Audit.....	90
1.3 Alat dan Bahan .....	90
1.4 Mekanisme Audit .....	92
<b>BAB II RENCANA AUDIT.....</b>	<b>93</b>
2.1 Ruang Lingkup Audit .....	93
2.2 Metode Pengumpulan Data.....	93
<b>BAB III TABEL KESESUAIAN AUDIT DI BPKAD MENGGUNAKAN FRAMEWORK COSO.....</b>	<b>94</b>
<b>BAB IV REKOMENDASI.....</b>	<b>98</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Kesesuaian domain Control Environment (Lingkungan Pengendalian) .....	94
Tabel 3. 2 Tabel Kesesuaian domain Risk Assessment (Penilaian Risiko) .....	95
Tabel 3. 3 Tabel Kesesuaian domain Control Activity (Pengendalian Aktivitas .....	96
Tabel 3. 4 Tabel Kesesuaian domain Information & Communication (Informasi & Komunikasi) .....	96
Tabel 3. 5 Tabel Kesesuaian domain Monitoring (Pemantauan) .....	97
Tabel 4. 1 Rekomendasi Hasil Audit .....	98

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dengan menyebut nama Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan audit teknologi informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sumatera Selatan menggunakan framework COSO. Dilakukannya audit ini sebagai upaya untuk memeriksa dan memperbaiki temuan audit yang ada di dalam Teknologi Informasinya. Diharapkan dengan adanya laporan audit ini, dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk perbaikan terhadap teknologi informasi yang belum sesuai, sehingga teknologi informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sumatera Selatan dapat terus berkembang dan bekerja secara optimal.

Palembang, Desember 2022

Putri Finishita

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Audit merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaiannya (Mulyadi, 2014). Menurut Arens et al. (2014), audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti yang terkait dengan informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kepatuhan informasi dengan kriteria yang telah ditentukan. Audit dilakukan dengan proses yang sistematis, yakni berupa proses terstruktur, terorganisir, terencana yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti secara objektif tanpa memihak. Audit memiliki beberapa jenis audit, salah satunya adalah audit teknologi informasi.

Audit teknologi informasi adalah bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Audit teknologi informasi ini dapat berjalan bersama-sama dengan audit finansial dan audit internal, atau dengan kegiatan pengawasan dan evaluasi lain yang sejenis. Pada mulanya istilah ini dikenal dengan audit pemrosesan data elektronik, dan sekarang audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua kegiatan sistem informasi dalam Instansi itu. Istilah lain dari audit teknologi informasi banyak dipakai untuk menentukan apakah aset sistem informasi Instansi itu telah bekerja secara efektif, dan integratif dalam mencapai target organisasinya.

Audit sistem informasi sangatlah penting untuk mendukung perkembangan Instansi dari waktu ke waktu agar Instansi dapat mengetahui apakah teknologi informasi yang digunakan relevan atau mampu menjawab kebutuhan Instansi atau tidak. Dasar dilakukannya audit sistem informasi agar Instansi lebih memperhatikan masalah perkembangan sistem dan dapat mengevaluasi bagaimana tingkat kesesuaian aplikasi sistem informasi dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Terdapat beberapa standar teknologi informasi untuk audit seperti *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission (COSO)*, *IT Balance Scorecard*, *Control Objective for Information Technologies (COBIT)*. Namun COSO fokus kepada pengontrolan aktivitas bisnis dan berfungsi untuk membantu dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam proses bisnis suatu organisasi. Pemilihan framework ini dikarekan kelebihanannya yaitu sudah ada di dalam frameworknya pengendalian internal dari proses manajemen dasar yaitu Penilaian Resiko (*Risk Assessment*) Kegiatan Pengendalian (*Control Activiities*) Kegiatan Pemantauan (*Monitoring Activites*) Lingkungan Kontrol (*Control environtmentt*) Pengecekan (*Monitoring*) Informasi dan komunikasi (*Information and Communication*).

Alasan penulis melakukan audit dengan menggunakan framework COSO di karenakan COSO dapat membantu Instansi mencapai tujuan dan mengoptimalkan kinerja organisasi dengan nilai-nilai kebijakan, Serta sistem kontrol yang di anggap tepat untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut. Karena itulah COSO dapat membantu auditor dalam menyeimbangkan tujuan organisasi dan sasaran kinerja dengan menggunakan pengendalian-pengendalian yang ada.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan organisasi yang mengelola keuangan dan aset daerah, kegiatannya yaitu seperti perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pemantauan keuangan daerah (himpunan dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (2011).

Untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menggunakan teknologi dalam melakukan pekerjaannya salah satunya adalah aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) SIPD, team IT serta teknologinya.

Adapun tujuan teknologi Informasi ini adalah Membantu pemerintah daerah untuk mempermudah dalam pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, pemantauan keuangan serta pertanggungjawaban. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah memerlukan audit terhadap teknologi informasinya karena di dalam teknologi informasi nya belum pernah diadakannya pengauditan, Selain itu semakin berkembangnya teknologi informasi akan menjadi ancaman-ancaman yang terjadi dari dalam maupun dari luar Instansi. Misalnya ada kebakaran di BPKAD, karna BPKAD belum meng upgrade aplikasinya yang masih melakukan penginstalan per desktop maka data-data tersebut akan hilang.

Maka daripada itu akan sangat mengkhawatirkan bila terjadi musibah tersebut. Untuk mencegah ancaman-ancaman tersebut maka dilakukanlah pengauditan menggunakan framework COSO untuk dapat membantu dan memeriksa. dalam

pengauditanya framework COSO menggunakan pengendalian-pengendalian yang ada, Serta dapat memeriksa apakah pengendalian tersebut telah mencapai tujuan atau belum maka diperlukanlah audit dalam suatu Instansi. Sehingga penelitian ini diharapkan mampu membantu dan memastikan keakuratan data informasi serta laporan yang sejalan dengan standart peraturan audit.

## **I.2 Tujuan Audit**

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengaudit teknologi informasi yang ada di BPKAD menggunakan Framework COSO.
2. Memberikan rekomendasi dai hasil audit untuk BPKAD Sumatera Selatan menggunakan framework COSO.

## **I.3 Alat dan Bahan**

Adapun alat-alat yang digunakan untuk mendukung keberhasilan penelitian ini yaitu;

1. Microsoft Office : sebagai alat media tulis saat penelitian
2. Kamera : sebagai alat pengambilan gambar saat penelitian
3. Alat perekam : sebagai alat untuk mengkap suara saat penelitian
4. Lembar kerja Audit : sebagai alat atau media pengisian data informasi saat penelitian audit TI.

Jenis bahan yang digunakan untuk mendukung keberhasilan penelitian audit ini yaitu:

1. Bukti langsung/ tidak langsung.

Bahan bukti yaitu surat balasan tentang pelaksanaan audit di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan, hasil observasi utama berupa data data yang diperlukan didalam penelitian baik data pegawai serta data pengguna yang menggunakan sistem yang akan di audit.

2. Bukti utama (primer)/ sekunder.

Bahan bukti utama/sekunder yaitu Tampilan data Sistem Informasi di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan sebagai bukti utama untuk melakukan audit didalam penelitian ini. Serta bukti bahwa telah melakukan wawancara terhadap pihak terkait mengenai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan sebagai pokok yang menjadi inti utama dalam melakukan audit.

3. Fakta/ Bukti hasil analisis.

Bukti yang didapat didalam hal ini yaitu hasil audit berupa rekomendasi dari auditor mengenai apa yang telah di audit serta berita acara sebagai pendukung bahwa rekomendasi atau bukti hasil analisis telah diterima oleh Instansi.

4. Record/ Testimonial Evidence.

Bukti yang terdapat didalam hal ini yaitu hasil wawancara. Wawancara ini diperlukan sebagai bukti pendukung, misalnya untuk menilai bagaimana

kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan, bukti yang paling valid antara lain adalah dengan melakukan wawancara terhadap pegawai atau organisasi dibawahnya. Adapun auditor melakukan wawancara dengan pihak IT Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan.

#### **I.4 Mekanisme Audit**

Mekanisme audit keamanan sistem informasi dilakukan dengan menyebarkan lembar kerja *Assesment* ini berisikan pertanyaan yang merujuk pada 17 prinsip dalam 5 komponen. Setelah pengisian dilakukan, selanjutnya auditor akan menganalisis kesesuaian antara BPKAD Sumsel dengan framework COSO. Setelah pengisian dilakukan, selanjutnya auditor akan menganalisis kesesuaian antara implementasi pada BPKAD SUMSEL berdasarkan pedoman COSO. Setelah dilakukannya analisis Langkah berikutnya adalah auditor akan memberikan rekomendasi yang merujuk pada pedoman COSO terhadap temuan audit pada implementasi.

## **BAB II**

### **RENCANA AUDIT**

#### **2.1 Ruang Lingkup Audit**

Adapun ruang lingkup audit teknologi informasi yaitu sebagai berikut;

1. Objek audit : Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Sumatera Selatan
2. Periode waktu audit : September 2022- November 2022
3. Auditee dan focus auditee
  - a. Kepala Dinas BPKAD
  - b. Staff IT BPKAD
  - c. Kasubag BPKAD

#### **2.2 Metode Pengumpulan Data**

Adapun ruang lingkup audit teknologi Informasi yaitu:

1. Wawancara  
Wawancara atau disebut juga tanya jawab sangat berguna dalam teknik pengumpulan data jika pemeriksa ingin mengumpulkan informasi awal yang relevan dengan penelitian untuk menemukan masalah yang akan diteliti dan jika peneliti ingin mengetahui masalah dengan responden yang sebenarnya dan jumlah responden.
2. Observasi  
Observasi dilakukan peneliti dengan mengamati sistem informasi BPKAD SUMSEL dengan mengakses dan mengamati secara langsung pengoperasiannya.
3. Dokumentasi  
Pendokumentasian adalah suatu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi berupa buku, catatan, dokumen, angka tekstual dan visual berupa laporan dan informasi yang dapat mendukung bantuan penelitian. Dokumen digunakan untuk mengumpulkan data dan kemudian ditinjau. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain jurnal, buku dan catatan BPKAD.

### BAB III

## TABEL KESESUAIAN AUDIT DI BPKAD MENGGUNAKAN FRAMEWORK COSO

Berikut adalah table kesesuaian audit yang di peroleh dari BPKAD Sumsel yang akan di sesuaikan dengan pengendalian internal dari framework COSO.

Tabel 3. 1Tabel Kesesuaian domain Control Environment (Lingkungan Pengendalian)

<b>Control Environment (Lingkungan Pengendalian)</b>			
<b>Prinsip</b>	<b>Pernyataan COSO</b>	<b>Penerapan teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>Sesuai atau tidak sesuai</b>
<b><i>Demonstrate Commitment To Integrity And Ethical Values</i></b> (Menunjukkan Komitmen Terhadap Integritas dan Nilai-Nilai Etika)	Organisasi menunjukkan komitmen terhadap nilai-nilai integritas dan etika pada teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan?	Terdapat kebijakan dan nilai etika dalam menunjang pencapaian Instansi dalam bidang IT serta telah di tetapkannya evaluasi kerja dan tata tertib yang sesuai dengan kebijakan dalam BPKAD Sumatera Selatan.	Sesuai
<b><i>Ensure That Board Exercises Oversight Responsibility</i></b> (Memastikan Bahwa Dewan Menjalankan Tanggung Jawab Pengawasan)	Dewan/manajemen menunjukkan kemandirian manajemen dan menjalankan pengawasan terhadap pengembangan dan bekerjanya Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan yang di lakukan kepada staff nya serta selalu melakukan pengawasan terhadap perkembangan kinerja layanan TI di BPKAD Sumatera Selatan.	Sesuai
<b><i>Establish Structures, Reporting Lines, Authorities And Responsibilities</i></b> (Menetapkan Struktur, Garis Pelaporan dan Tanggung Jawab)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan dalam pengawasannya dewan menetapkan struktur, garis pelaporan, serta wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dalam pencapaian tujuan	BPKAD Sumsel belum menetapkan struktur garis pelaporan serta wewenang dan tanggung jawab yang sesuai dalam mencapai tujuan	Tidak Sesuai
<b><i>Demonstrate Commitment To A Competent Workforce</i></b> (Menunjukkan Komitmen Kepada Tenaga Kerja yang Kompeten)	Instansi menunjukkan komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten dalam keselarasan Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan	BPKAD Sumsel mempunyai proses recruitment karyawan dan proses pengembangan yang kompeten sesuai dengan kebijakan pemmerintah	Sesuai
<b><i>Hold People Accountable</i></b> (Mempertahankan Pertanggungjawaban Individu)	Instansi mempertahankan individu yang kompeten dalam tanggung jawab terhadap Sistem Informasi	BPKAD Sumsel dapat mempertahankan karyawan kompeten dan menantisipasi	Sesuai

	pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan dalam mengejar tujuan?	perubahan personel secara tiba-tiba serta perusahaan memiliki penilaian terhadap kinerja dan Tindakan disiplin untuk setiap karyawan.	
--	---	---	--

Tabel 3. 2 Tabel Kesesuaian domain Risk Assessment (Penilaian Risiko)

<b>Risk Assessment (Penilaian Risiko)</b>			
<b>Prinsip</b>	<b>Pernyataan COSO</b>	<b>Penerapan teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>Sesuai atau tidak sesuai</b>
<b><i>Specifies Relevant Objectives</i></b> (Menetapkan tujuan yang relevan)	Instansi menetapkan tujuan organisasi yang jelas untuk memungkinkan identifikasi terjadinya risiko terhadap sistem informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan	Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah memiliki kebijakan untuk mengidentifikasi terjadinya risiko dalam Sistem informasi.	Sesuai
<b><i>Identifies and Analyzes Risks</i></b> (Mengidentifikasi dan Menganalisa Resiko)	Instansi mengidentifikasi risiko yang akan terjadi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan sebagai dasar penentuan dalam pencapaian tujuan diseluruh penjurur Instansi (entitas)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah belum mampu mengidentifikasi risiko pada sistem informasi.	Tidak Sesuai
	Instansi menganalisa Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan sebagai dalam menentukan pengelolaan risiko diseluruh penjurur Instansi (entitas)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah telah menganalisis sistem informasi yang dilaksanakan oleh pihak IT	Sesuai
<b><i>Assess Fraud Risk</i></b> (Menilai Resiko Kecurangan)	Instansi memperhitungkan potensi kecurangan dalam menilai risiko pencapaian tujuan	Kepala BPKAD, jajaran Direksi serta pihak IT saling bekerjasama untuk menilai risiko potensi terjadinya fraud pada sistem informasi yang ada di BPKAD Sumatera Selatan.	Sesuai
<b><i>Identifies and Analyzes Significant Change</i></b> (Mengidentifikasi dan Menganalisa Perubahan Signifikan)	Instansi mengidentifikasi perubahan-perubahan dalam teknologi informasi yang secara signifikan dapat mempengaruhi Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan	BPKAD Sumatera Selatan menerapkan meeting akhir tahun untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi perubahan-perubahan yang dapat mempengaruhi sistem informasi pada BPKAD	Sesuai

Tabel 3. 3 Tabel Kesesuaian domain Control Activity (Pengendalian Aktivitas)

<b>Control Activity (Pengendalian Aktivitas)</b>			
<b>Prinsip</b>	<b>Pernyataan COSO</b>	<b>Penerapan teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>Sesuai atau tidak sesuai</b>
	Instansi memilih kegiatan pengendalian yang berkontribusi terhadap peringanan risiko terhadap pencapaian tujuan Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan untuk ketinggian yang dapat diterima?	BPKAD Sumsel belum menerapkan kegiatan pengendalian yang berkontribusi untuk meringankan risiko terhadap pencapaian tujuan Sistem Informasi untuk ketinggian yang dapat diterima.	Tidak Sesuai
<b>Select and Develops Control Activities</b> (Memilih dan Mengembangkan Kegiatan Pengawasan)	Instansi mengembangkan kegiatan pengendalian yang berkontribusi terhadap peringanan risiko terhadap pencapaian tujuan Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan untuk ketinggian yang dapat diterima?	Belum adanya pengembangan kegiatan pengendalian yang berkontribusi untuk peringanan risiko pada sistem informasi pada BPKAD Sumsel	Tidak sesuai
<b>Select and Develops General Controls Over Technology</b> (Memilih dan Mengembangkan Kontrol Secara Umum atas Teknologi)	Instansi memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian umum Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan untuk mendukung tercapainya tujuan organisasi?	BPKAD Sumsel telah mengembangkan kegiatan pengendalian umum atas Sistem Informasi Penjualan dengan cara menjaga hak aset user dan bertanggung jawab untuk memelihara sumber daya yang berhubungan dengan software, hardware dan network di BPKAD Sumsel	Sesuai
<b>Deploys Through Policies And Procedures</b> (Menyebarkan Melalui Kebijakan dan Prosedur)	Pengendalian Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan telah dijalankan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang diharapkan	BPKAD memiliki prosedur untuk mencatat, memonitor, dan memperbaiki fasilitas layanan TI yang ada di BPKAD	Sesuai

Tabel 3. 4 Tabel Kesesuaian domain Information &amp; Communication (Informasi &amp; Komunikasi)

<b>Information &amp; Communication (Informasi &amp; Komunikasi)</b>			
<b>Prinsip</b>	<b>Pernyataan COSO</b>	<b>Penerapan teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>Sesuai atau tidak sesuai</b>
<b>Use relevant, quality information to support the internal control function</b> (Menggunakan Informasi yang Relevan dan Berkualitas Untuk Mendukung Fungsi Pengendalian Internal)	Instansi memperoleh dan menggunakan informasi yang relevan dan berkualitas untuk mendukung fungsi sistem informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan	BPKAD Sumsel memperoleh data yang relevan dari sumber internal dan eksternal yang dapat diandalkan secara tepat waktu	Sesuai

<b>Communicate Internal Control Information Internally</b> (Mengkomunikasikan informasi pengendalian internal secara internal)	Instansi mengkomunikasikan informasi secara internal terhadap sistem informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan	Belum diterapkannya komunikasi informasi secara internal	Tidak Sesuai
	Instansi mengkomunikasikan tanggung jawab <i>internal control</i> yang diperlukan untuk mendukung fungsi sistem informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan	Belum adanya pengkomunikasian tanggung jawab internal control untuk mendukung fungsi sistem informasi pada BPKAD Sumsel	Tidak Sesuai
<b>Communicate Internal Control Information Externally</b> (Mengkomunikasikan informasi pengendalian internal secara eksternal)	instansi mengkomunikasikan secara eksternal mengenai hal-hal yang mempengaruhi fungsi sistem informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan	BPKAD Sumsel memiliki metode yang tepat untuk berkomunikasi kepada pihak eksternal.	Sesuai

Tabel 3. 5Tabel Kesesuaian domain Monitoring (Pemantauan)

<b>Monitoring (Pemantauan)</b>			
<b>Prinsip</b>	<b>Pernyataan COSO</b>	<b>Penerapan teknologi Informasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>Sesuai atau tidak sesuai</b>
<b>Conduct Ongoing And/Or Separate Evaluations</b> (Melakukan Evaluasi Berkelanjutan dan/atau Terpisah)	Instansi memilih, mengembangkan dan melakukan evaluasi yang sedang berlangsung atau terpisah untuk memastikan apakah komponen Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan dapat berfungsi	BPKAD Sumsel melakukan evaluasi terhadap layanan TI serta mencatat kejadian yang terjadi terhadap keamanan yang ada di instansi	Sesuai
<b>Evaluates and Communicates Deficiencies</b> (Mengevaluasi, dan Mengkomunikasikan Kekurangan)	Instansi mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan Sistem Informasi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sumatera Selatan secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk mengambil tindakan korektif, termasuk manajemen senior dan dewan	BPKAD Sumsel memiliki jadwal yang tepat terkait dalam pengevaluasian dan pengkomunikasian kekurangan sistem informasi yang ada di BPKAD Sumsel.	Sesuai

## BAB IV

### REKOMENDASI

Berikut adalah rekomendasi terhadap temuan audit Teknologi Informasi dengan menggunakan framework COSO pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Tabel 4. 1 Rekomendasi Hasil Audit

No.	Domain	Masalah yang terjadi	Rekomendasi
1	<i>Control Environment</i>	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah mengimplementasikan kebijakan perusahaan dan nilai-nilai etika, namun belum dikelola dan dikontrol dengan baik	Melakukan pengontrolan secara berkala tentang kebijakan yang dibuat, apakah harus ada yang diperbaharui atau tidak dan mempertimbangkan nilai-nilai etika dalam perusahaan agar tercipta kerjasama yang baik untuk menunjang kegiatan perusahaan.
		Dalam melakukan pengawasan, direktur perusahaan belum melakukan secara tepat waktu dan terjadwal serta tidak ada catatan terhadap pengawasan tersebut.	Membuat jadwal kegiatan pengawasan pada setiap bagian IT BPKAD Sumsel, setiap pengawasan harus dilakukan dengan konsisten dan memiliki dokumentasi agar bisa membandingkan atau memperbaiki layanan teknologi informasi.
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki prosedur tentang proses <i>recruitment</i> karyawan yang kompeten. Namun, belum dilakukan dengan konsisten berdasarkan kebijakan perusahaan yang telah dibuat.	Melakukan peninjauan secara berkala dan evaluasi terhadap kebijakan perusahaan tentang proses <i>recruitment</i> karyawan yang kompeten. Prosedur ini harus dicek dengan teliti agar tidak sia-sia dalam memilih karyawan nantinya.
2		Penilaian risiko terkait layanan TI perusahaan belum dilakukan dengan maksimal dan terdefinisi dengan baik.	Meninjau dan mengevaluasi apa saja faktor yang menyebabkan penilaian risiko belum dilakukan dengan baik. Membuat laporan penilaian risiko yang terjadi, dengan adanya laporan tersebut semakin mudah untuk mengetahui risiko-risiko yang

	<b>Risk Assessment</b>		dapat mengganggu jalannya kinerja perusahaan
		Belum adanya review secara rutin yang dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko layanan TI perusahaan.	Membuat jadwal untuk melakukan review secara rutin dalam mengidentifikasi dan menganalisis risiko layanan TI, serta membuat dokumentasi layanan TI perusahaan yang dapat menjadi risiko/perubahan pada proses permasalahan tersebut
3	<b>Control Activities</b>	Pihak IT dalam meninjau permasalahan belum melakukan perbaikan berkelanjutan dan inovasi untuk mengembangkan kegiatan perusahaan.	Pihak IT dapat membuat continue plan untuk mengembangkan inovasi atau ide yang didapatkan dari karyawan. Mengontrol dan melakukan perbaikan berkelanjutan tentang masalah layanan TI
		Belum adanya jadwal rutin untuk mengecek siapa saja yang menggunakan hak akses pada layanan TI perusahaan	Membuat daftar jadwal untuk mengecek penggunaan hak akses layanan TI secara berkala. Mengevaluasi dan membuat laporan siapa saja yang menggunakan hak akses pada layanan TI perusahaan.
		Belum ada dokumentasi untuk memonitoring staf yang melakukan backup data.	Membuat dokumentasi untuk memonitoring staf yang melakukan backup data pada layanan TI perusahaan. Back up data dilakukan secara berkala (misalnya satu bulan sekali) dan setiap staf diwajibkan mengisi dokumentasi monitoring back up data
		Belum menyusun dan mem-backup data yang penting sesuai jadwal.	Membuat rencana dan menyusun back up data penting yang digunakan oleh perusahaan. Back up data harus dilakukan sesuai jadwal dan konsisten agar dokumen atau file penting tidak hilang dan dapat disimpan dengan aman.
4	<b>Information &amp; Communication</b>	Pihak IT sudah memiliki prosedur form layanan permasalahan namun, belum ada evaluasi yang terjadwal dan penanganan yang cepat pada proses ini.	Setelah mengisi form layanan permasalahan, pihak IT harus melakukan tindak lanjut untuk menangani permasalahan yang terjadi. Melakukan evaluasi atau perbaikan tentang layanan permasalahan dari insiden 73 yang terjadi dalam perusahaan.
		Kesadaran menjaga informasi dan data yang bersifat private dan confidential.	Menyaring informasi dan data yang masuk/keluar pada perusahaan agar tidak merugikan pihak perusahaan. Memberikan teguran atau sanksi bagi karyawan yang tidak menjaga informasi yang

			bersifat private dan confidential.
		Pemahaman tentang membatasi pihak-pihak yang tidak terkait dengan tugas atau permasalahan yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal.	Membuat standar pengawasan tentang batasan pihak-pihak yang tidak terkait dengan tugas atau permasalahan yang terjadi, baik secara internal maupun eksternal.
5	<i>Monitoring</i>	Tidak memiliki dokumentasi atau form penyelesaian masalah yang sudah diselesaikan.	Membuat dokumentasi atau form penyelesaian masalah yang terjadi di bagian IT yang sudah diselesaikan sesuai prosedur
		Belum dilakukan perbaikan yang berkelanjutan secara teratur untuk meminimalisir terjadinya insiden lain atau insiden yang akan datang.	Membuat dokumentasi atau rencana ke depan tentang permasalahan yang terjadi dan mengevaluasi setiap perbaikan untuk meminimalisir terjadinya insiden yang akan datang.
		Sulit mendapatkan bantuan teknis.	Melakukan kerjasama atau membuat pelatihan staf khusus yang dibentuk untuk membantu pihak perusahaan. Mengevaluasi bantuan teknis yang di dapat untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan.

8. Photo Dokumentasi





*Lampiran 1. 9 Photo Dokumentasi*